



Profil Gender dan Anak

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2020



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TIM PENYUSUN

PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2020

Pengarah :

drg. Ien Adriany, M. Kes;
Darwis Sitorus S.Si M.Si

Koordinator :

Endang S Lerrich, SE, ME
Ir. Desmon Sinurat

Editor :

Ir. Desmon Sinurat
Muhamad Sukin, SST, M. Stat
apt. Oce Y.N Boymau, SF, MScPH

Penulis/ Pengolah Data :

Clara Arsinta, SST
Minanur Rohman, SST
Tim DP3A Provinsi NTT dan DP3A kab/kota

Pengumpul Data:

Albert Christian Lulan
Dewi Rara, SST
Febriany Lete, SST
Charles Damaleru, SE
Muhamad Fariq Hidayat, S.Si
Yeni Y Boymau, SKM
Ira Ambarita, SKM
Helena Jago, S.E, MM
Yosefita Jelamu, S.Sos

Kontributor:

Dr. Theresia Sarlyn Ralo, MPH
Drg. Maria Silalahi, MPH
Dra. Margaritha Boekan
Dra. Maria P Sumarni, MM
Anesta M Nesimnasi, SE, MM
More Ala Maria, SE
Angelina DJami, SE
Naube Blegur, S.Sos
Yanti L.B Salata, S.Sos
Seplex Bengkiuk, SH
Japlin EB Lay, SH
Ivone Patricia Paa, S.Pi, M.Si
Dra. Theresia Ratna D.Astuti
Meity J Kuhurima, S.Kom

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dengan 6 (enam) sub bidang urusan yaitu kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak. Profil gender dan anak ini adalah implementasi program pengelolaan sistem data gender dan anak.

Penyusunan Profil Gender dan Anak Tahun 2020 merupakan kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT dengan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

Profil Gender dan Anak menyediakan informasi profil perempuan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Hukum dan Sosial Budaya, Politik dan Pengambilan Keputusan serta Profil Anak. Data yang disajikan bersumber dari Badan Pusat Statistik, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Mitra program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam Profil Gender dan Anak tahun 2020 ini juga dipublikasikan program kegiatan yang telah diimplementasikan oleh DP3A Provinsi dan kabupaten/kota.

Kami menyadari banyak kekurangan dalam publikasi ini, untuk itu saran dan perbaikan demi penyempurnaan di tahun yang akan datang sangat kami harapkan.

Akhirnya penghargaan dan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, bantuan sampai terbitnya Profil Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

Kupang, Desember 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

၃



drg. Iien Adriany, M.Kes

NIP. 19710818 2000032007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I. Gambaran Umum	1
- Kondisi Geografis dan Pemerintahan	3
- Kondisi Kependudukan	8
BAB II. Profil Perempuan	20
- Indeks Pembangunan Manusia	20
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	21
- Indeks Pemberdayaan Gender	25
- Indeks Kualitas Keluarga	31
- Indeks Kebahagiaan	34
- Perempuan Ketenagakerjaan Serta Politik	36
BAB III. Profil Anak	53
- Kajian Indikator Pemenuhan Hak Anak	55
- Kajian Anak dan Pendidikan	65
- Kajian Pekerja Anak	75
BAB IV. Kegiatan dan Praktek Baik Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77
- Kegiatan Pada DP3A Provinsi NTT	79
- Program/Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab/Kota	93
LAMPIRAN	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur, 1980-2020	9
Gambar 1.2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Periode 2010-2020	11
Gambar 1.3	Piramida Penduduk Nusa Tenggara Timur, 2020	12
Gambar 1.4	Kepadatan Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten, 2020	15
Gambar 2.1	Indikator IPM dan Komponen Penyusunnya di Provinsi NTT, 2018-2020	23
Gambar 2.2	IPM Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2018-2020	24
Gambar 2.3	Indikator IDG dan Komponen Penyusunnya di Provinsi NTT, 2018-2020	26
Gambar 2.4	IPG Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2018-2020	27
Gambar 2.5	IDG dan Persentase Komponen IDG Provinsi NTT, 2018-2020	29
Gambar 2.6	IDG Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2018-2020	30
Gambar 2.7	Capaian IKK Provinsi Tahun 2019-2020	33
Gambar 2.8	Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Penyusun Indeks Kebahagiaan Penduduk NTT Menurut Jenis Kelamin, 2017	35
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu	37
Gambar 2.10	TPAK Penduduk NTT Menurut Jenis Kelamin, 2018-2020	39
Gambar 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk NTT Menurut Jenis Kelamin, 2018-2020	41

Gambar 2.12	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTT, 2020	42
Gambar 2.13	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTT, 2020	44
Gambar 2.14	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTT, 2020	45
Gambar 2.15	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTT, 2020	48
Gambar 2.16	Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Gambar 2.17	Persentase Keterlibatan Perempuan menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-NTT, 2020	52
Gambar 3.1	Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Nusa Tenggara Timur, 2018-2020	54
Gambar 3.2	Persentase Ibu yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Kabupaten/Kota, 2020	56
Gambar 3.3	Persentase Ibu yang Melakukan IMD Kurang dari Satu Jam Setelah Dilahirkan di NTT, 2019-2020	58
Gambar 3.4	Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di NTT, 2018-2020	62
Gambar 3.5	Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Jenis Imunisasi di NTT, 2020	63

Gambar 3.6	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta, 2020	64
Gambar 3.7	APS Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi NTT Tahun 2020	67
Gambar 3.8	APK Penduduk NTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2020	68
Gambar 3.9	APM Penduduk NTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2020	70
Gambar 3.10	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi NTT, 2019-2020	71
Gambar 3.11	Angka Putus Sekolah di Provinsi NTT, 2020	72
Gambar 3.12	Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi NTT, 2020	74
Gambar 3.13	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Provinsi NTT, 2018-2020	76
Gambar 4.1	Road show PPRG di Perangkat Daerah	82
Gambar 4.2	Seorang anak yang baru lahir di salah satu rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran	83
Gambar 4.3	Publikasi layanan online dan Operator sedang menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	86
Gambar 4.4	Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama	90
Gambar 4.5	Uji coba modul ketahanan keluarga untuk pencegahan stunting bagi Calon pengantin tahun 2021	90
Gambar 4.6	Sosialisasi dan pendampingan teknis "Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan	

	Stunting” di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	92
Gambar 4.7	Bimtek GRA di Kota Kupang	94
Gambar 4.8	Tipe KK di Kab. Sikka tahun 2019 menurut ketahanan keluarga	98
Gambar 4.9	Tingkat Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2019	99
Gambar 4.10	Pendataan Ketahanan Keluarga di Kab. Sikka	100
Gambar 4.11	Kegiatan Puspaga di Kabupaten Sumba Barat	104
Gambar 4.12	Kegiatan Lopo Cerdas	107
Gambar 4.13	Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan KDRT	108
Gambar 4.14	Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan KDRT dan kekerasan seksual	109
Gambar 4.15	Kegiatan Sosialisasi dan advokasi PUG di Kab. Alor	110
Gambar 4.16	Kegiatan Forum Anak Kabupaten TTS	111

Bab 1



Pendahuluan

Profil Kependudukan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
2020



Luas Wilayah NTT

47.931 km²

Jumlah Penduduk NTT 2020

5,25 Juta

Kepadatan Penduduk NTT 2020

111 Jiwa
per km²



BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis dan Pemerintahan

1. Keadaan Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota yang terletak di 7 (tujuh) pulau besar yaitu, Pulau Sumba: terdapat 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Pulau Timor terdapat Kota Kupang dan 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka. 8 Kabupaten di Pulau Flores yaitu Kabupaten Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Pulau Alor, Kabupaten Alor, serta 3 kabupaten lain di pulau masing-masing yaitu Kabupaten Lembata di Pulau Lembata, Kabupaten Rote di Pulau Rote dan Kabupaten Sabu Raijua di Pulau Sabu.

Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 8 – 12 Lintang Selatan dan 118 – 125 Bujur Timur, dan Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores. Batas-batas geografis yaitu Utara- Laut Flores, Selatan Samudera Hindia, Timur- Negara Timor Leste, Barat- Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintahan

Penambahan wilayah administratif Kecamatan dan desa di 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT pada tahun 2020 terjadi pada satu kecamatan di Kabupaten Rote Ndao yaitu dari 20 Kecamatan menjadi 21 Kecamatan. Kecamatan tersebut merupakan gabungan dari 10 desa yang telah ada sebelumnya. Jika dilihat

pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, tidak terdapat pemekaran kecamatan/desa yang terdaftar secara administratif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah Desa yang bertambah di Kabupaten/Kota pada tahun 2018, Kabupaten Rote Ndao yaitu dari 89 Desa menjadi 119 Desa serta penambahan di Kabupaten Sumba Barat Daya terjadi pada rentang tahun 2017 yaitu 113 menjadi 175 Desa.

Kabupaten Timor Tengah Selatan tercatat merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak yakni sebanyak 32 kecamatan dalam 3 tahun terakhir. Sementara di Kabupaten Sumba Tengah hanya ada 5 kecamatan hingga tahun 2020. Kabupaten Sumba Barat, Sabu Raijua dan Kota Kupang masing-masing memiliki 6 kecamatan.

Tabel 1.
 Jumlah Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1.	Sumba Barat	6	6	6
2.	Sumba Timur	22	22	22
3.	Kupang	24	24	24
4.	Timor Tengah Selatan	32	32	32
5.	Timor Tengah Utara	24	24	24
6.	Belu	12	12	12
7.	Alor	17	17	17
8.	Lembata	9	9	9
9.	Flores Timur	19	19	19
10.	Sikka	21	21	21
11.	Ende	21	21	21
12.	Ngada	12	12	12
13.	Manggarai	12	12	12
14.	Rote Ndao	10	10	11
15.	Manggarai Barat	12	12	12
16.	Sumba Tengah	5	5	6
17.	Sumba Barat Daya	11	11	11
18.	Nagekeo	7	7	7
19.	Manggarai Timur	9	9	9
20.	Sabu Raijua	6	6	6
21.	Malaka	12	12	12
22.	Kota Kupang	6	6	6
Jumlah/Total Desa		309	309	311

Sumber: BPS, 2020

Dalam 3 tahun terakhir, jumlah kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi penambahan pada 2020 yaitu satu kecamatan di Kabupaten Rote Ndao dan satu Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah. Kecamatan tersebut merupakan pemekaran dari kecamatan yang telah ada sebelumnya.

Jumlah desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun cenderung tetap yakni sebesar 3.353 desa. Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Ende tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yakni masing-masing sebanyak 278 desa/kelurahan. Sementara Kota Kupang memiliki hanya 51 kelurahan.

Tabel 2.
 Jumlah Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1.	Sumba Barat	74	74	74
2.	Sumba Timur	156	156	156
3.	Kupang	177	177	177
4.	Timor Tengah Selatan	278	278	278
5.	Timor Tengah Utara	193	193	193
6.	Belu	81	81	81
7.	Alor	175	175	175
8.	Lembata	151	151	151
9.	Flores Timur	250	250	250
10.	Sikka	160	160	160
11.	Ende	278	278	278
12.	Ngada	151	151	151
13.	Manggarai	171	171	171
14.	Rote Ndao	119	119	119
15.	Manggarai Barat	169	169	169
16.	Sumba Tengah	65	65	65
17.	Sumba Barat Daya	175	175	175
18.	Nagekeo	113	113	113
19.	Manggarai Timur	176	176	176
20.	Sabu Raijua	63	63	63
21.	Malaka	127	127	127
22.	Kota Kupang	51	51	51
Jumlah/Total Desa		3353	3353	3353

Sumber: BPS, 2020

B. Kondisi Kependudukan

1. Pertumbuhan dan Komposisi Penduduk Nusa Tenggara Timur

Penduduk merupakan modal dasar bagi berlangsungnya pembangunan nasional. Penduduk menjadi prioritas pembangunan pemerintah, yakni diletakkan pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Penduduk merupakan pusat dari segala kebijakan program pembangunan sekaligus merupakan sumber daya yang melaksanakan pembangunan. Kondisi kependudukan sangat berpengaruh pada dinamika pembangunan nasional. Berbagai program kerja antar elemen masyarakat juga telah diarahkan bagi peningkatan kualitas penduduk Indonesia.

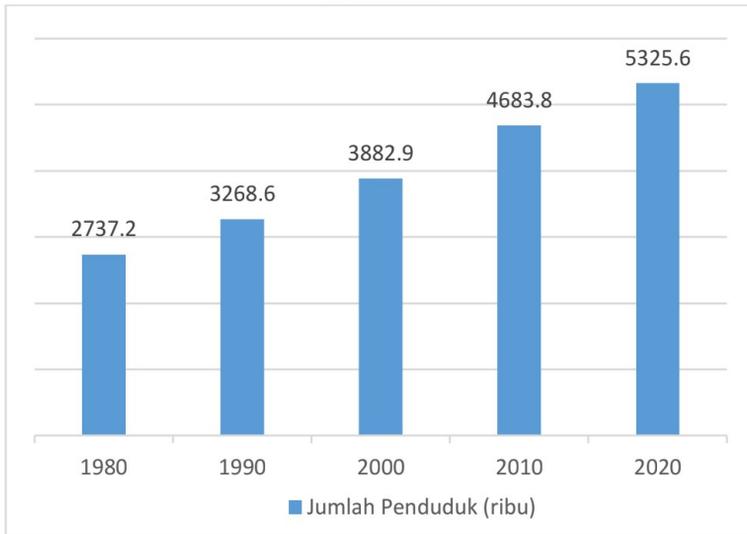
Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban yang berat apabila tidak didukung oleh kualitas penduduk yang memadai. Kualitas penduduk mencakup kemampuan pendidik secara fisik, sosial, emosi maupun secara materi, yang oleh karenanya berkaitan dengan kondisi kesehatan, penguasaan pendidikan dan pengetahuan, kemampuan ekonomi serta kepribadian. Permasalahan kependudukan selain kualitas penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi serta persebaran antar wilayah. Kebijakan di bidang kependudukan perlu diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, yang disertai dengan peningkatan kualitas penduduk, dan kebijakan persebaran penduduk yang menunjang kegiatan pembangunan.

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 sebesar 5,325 juta jiwa yang terdiri dari 2,663 juta jiwa penduduk laki-laki dan 2,661 juta jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk ini mengalami kenaikan sekitar 341,7 ribu jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 yakni sebesar 4,68 juta jiwa

atau mengalami penambahan 7,29 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Secara rata-rata penduduk Nusa Tenggara Timur bertambah dengan laju pertumbuhan 1,25 persen per tahun dalam kurun waktu 2010-2020. Kecepatan pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan menurun walau tidak terlalu signifikan.

Jika dilihat lebih detail berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki tumbuh lebih cepat daripada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki tumbuh sebesar 14,49% antara 2010-2020, sedangkan penduduk perempuan tumbuh 12,91% pada periode yang sama. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

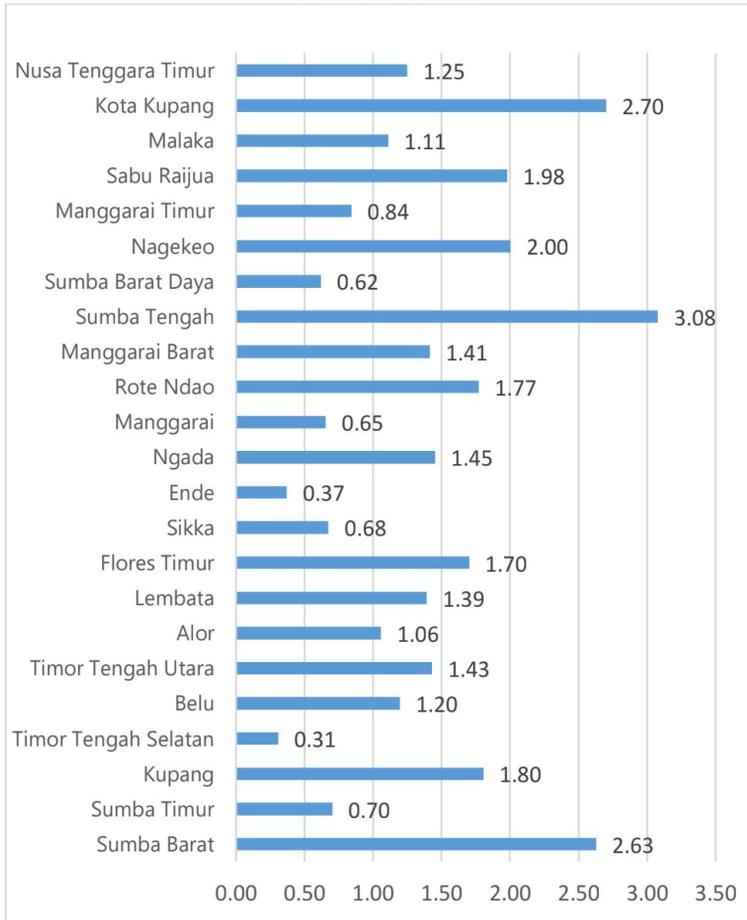
Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur,
1980-2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020-BPS

Berdasarkan wilayah, beberapa kabupaten/kota menunjukkan kecepatan pertumbuhan yang beragam. Jika dilihat pertambahan penduduk tahunan antar kabupaten/kota sejak tahun 2010 hingga 2020, beberapa kabupaten/kota memiliki laju pertumbuhan yang tinggi dibandingkan kabupaten lainnya, namun ada juga yang tidak sampai satu persen. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Tengah tercatat mencapai 3,08 persen pada periode 2010-2020, sementara pertambahan penduduk Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Manggarai, Ende, Sikka, dan Timor Tengah Selatan kurang dari satu persen di waktu yang sama.

Gambar 1.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan
Periode 2010-2020

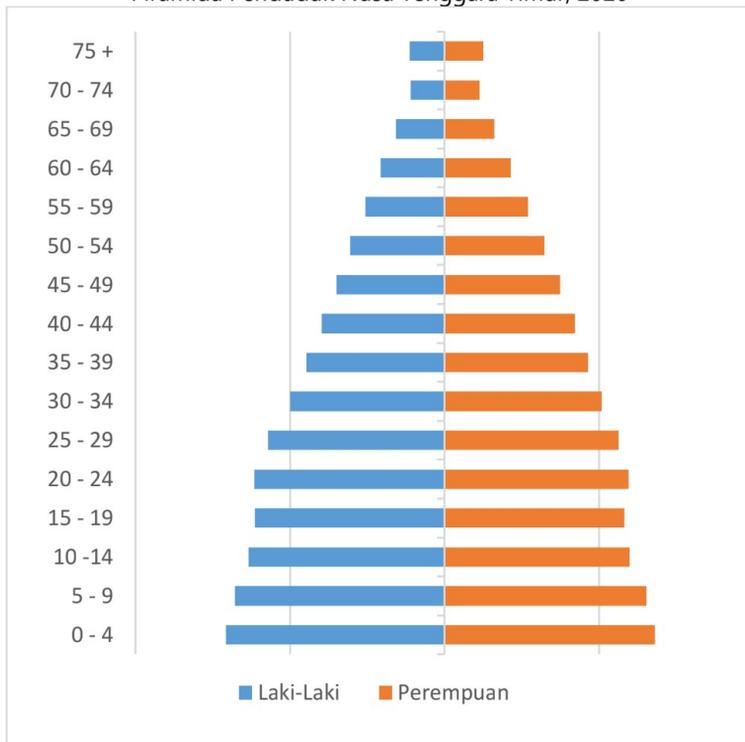


Sumber: Sensus Penduduk 2020-BPS

Keadaan penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan komposisi persentase laki-laki sebanyak 50,01 persen sedangkan perempuan sebesar 49,98 persen. Dari angka di atas, dapat diketahui perbandingan jumlah penduduk

laki-laki dan perempuan yang disajikan melalui angka sex ratio. Sex ratio penduduk Nusa Tenggara Timur sebesar 100,07 persen, berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Sex ratio tersebut cenderung konstan pada masing-masing kelompok umur.

Gambar 1.3
Piramida Penduduk Nusa Tenggara Timur, 2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020-BPS

Piramida penduduk memberikan informasi distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa struktur umur penduduk didominasi oleh penduduk muda yang ditandai

dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Frekuensi terbesar penduduk laki-laki dan perempuan berada pada kelompok umur 0-14 tahun, yang berarti bahwa kelompok penduduk muda tersedia dalam jumlah yang banyak di Nusa Tenggara Timur. Ketersediaan kelompok penduduk muda ini merupakan aset besar bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur apabila ada jaminan perolehan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dalam masa tumbuhnya. Apalagi dalam waktu ke depan merupakan kelompok penduduk yang siap masuk ke dalam dunia kerja.

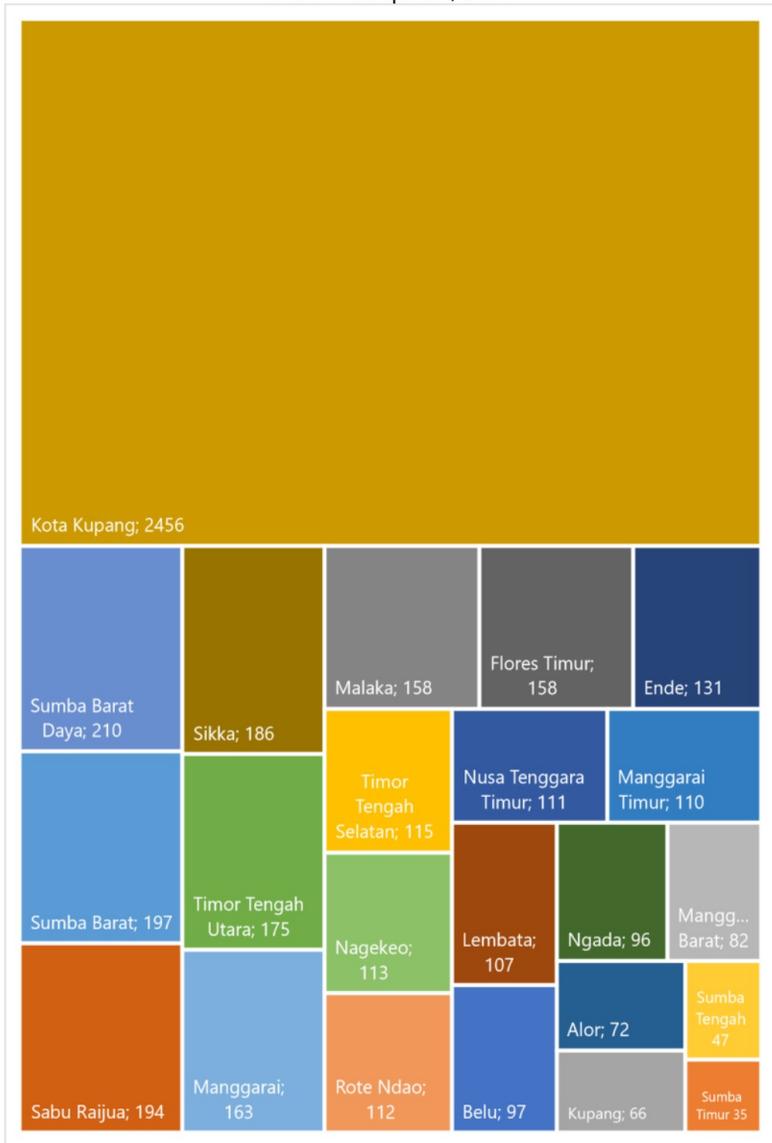
Pengelompokan penduduk menurut struktur umur penduduk dan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu penduduk usia produktif (15-64 tahun), belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Berdasarkan pengelompokan ini, penduduk Nusa Tenggara Timur yang masuk usia produktif sebanyak 64,4 persen, sementara 36,6 persen berada pada kelompok usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Pandangan umumnya, bahwa kelompok penduduk usia produktif secara ekonomi memiliki tanggungan atas kelompok penduduk usia tidak produktif. Beban ketergantungan penduduk ini pada tahun 2020 sebesar 36,6 persen, yang dapat diartikan bahwa 100 penduduk usia produktif di Nusa Tenggara Timur harus menanggung minimal 36 penduduk tidak produktif.

2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Nusa Tenggara Timur

Luas wilayah daratan Nusa Tenggara Timur sebesar 47.931,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 5,25 juta jiwa, maka tiap kilometer persegi ditinggali oleh 111 jiwa. Kepadatan penduduk beragam antara Kabupaten/Kota. Kota Kupang yang memiliki luasan wilayah hanya sebesar 0,38 persen dari luas keseluruhan Provinsi Nusa Tenggara Timur dihuni oleh 8,31 persen penduduk Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, Kota Kupang memegang predikat sebagai Kabupaten/Kota dengan penduduk terpadat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kepadatan mencapai 2.456 jiwa per kilometer persegi. Kondisi yang kontras terjadi pada Kabupaten Sumba Timur. Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur adalah 14,61 persen dari total wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun hanya 4,61 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang tinggal di wilayah Sumba Timur, sehingga kepadatan penduduk Sumba Timur hanya 35 jiwa per kilometer persegi.

Berbagai faktor mempengaruhi kepadatan penduduk yang tidak merata ini di Nusa Tenggara Timur, selain topografi wilayah dan mobilitas penduduk, faktor lainnya daya tarik ekonomi dan ikatan sosiologis pun turut mendukung. Pada beberapa kabupaten dengan jumlah penduduk besar hanya mendiami luasan wilayah yang tidak besar. Sebaliknya pada wilayah dengan luasan besar hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang sedikit. Kepadatan penduduk kabupaten/kota disajikan dalam visualisasi dibawah.

Gambar 1.4
 Kepadatan Penduduk Nusa Tenggara Timur
 Menurut Kabupaten, 2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020-BPS

Jika dilihat dari tinjauan kepulauan, Nusa Tenggara Timur terbagi menjadi 3 Pulau besar, yaitu Pulau Sumba, Pulau Flores dan Pulau Timor. Di Pulau Sumba, kepadatan penduduk di Kabupaten Sumba Barat tercatat tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Pulau Sumba Lainnya yaitu 210 jiwa per kilometer persegi. Sementara Sumba Tengah merupakan yang terendah dengan kepadatan penduduk sebesar 47 jiwa per kilometer persegi. Diantara kabupaten/kota di Pulau Flores, Kabupaten Sikka tercatat memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebanyak 186 penduduk per km persegi, dan Kabupaten Manggarai Barat tercatat paling rendah dengan kepadatan 47 jiwa perkilometer persegi.

Bab 2



Profil Perempuan

Profil Kependudukan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
2020



Indeks Pembangunan Gender 2020

74,53 %

TPAK Perempuan NTT 2020

63,91 %

Jumlah Anggota DPRD Perempuan

12 orang

dari total 65 anggota DPRD



BAB II

PROFIL PEREMPUAN

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dimensi standar hidup yang layak diukur oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran.

Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Indeks Kesehatan
$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Indeks Pengetahuan
$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

Indeks Pengeluaran
$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Komponen	Satuan	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai

$$IPM = \sqrt{I_{UHH} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

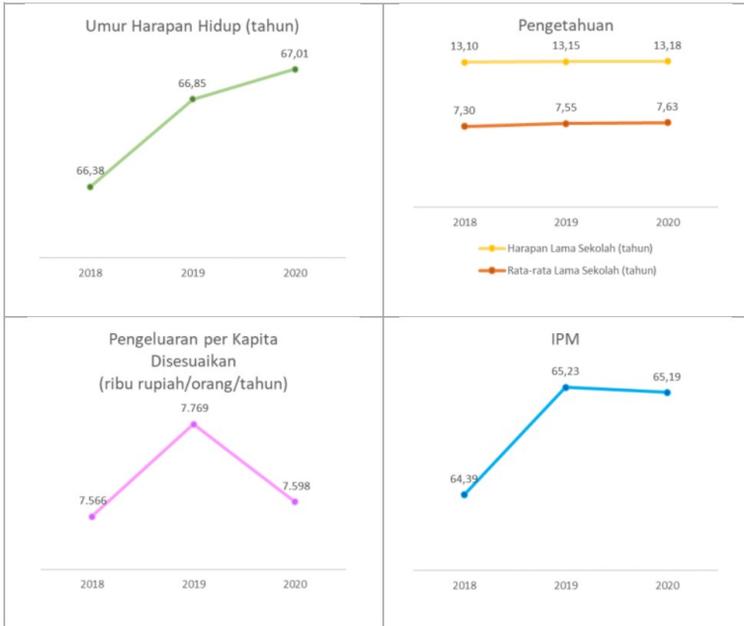
Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan belajar mengajar di sekolah saat ini dilakukan secara virtual. Beberapa pelayanan kesehatan yang bersifat konsultatif sebagian besar juga dilaksanakan melalui komunikasi telepon atau secara daring. Kegiatan sosial ekonomi yang menimbulkan kerumunan juga banyak dihindari dengan tujuan untuk mencegah penularan virus tersebut.

Seluruh indikator ekonomi makro dan sosial juga mengalami tekanan berat, tidak terkecuali IPM. IPM di NTT tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, IPM NTT sebesar 65,19. Angka ini menurun sebesar 0,04 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2019 sebesar 65,23. Status pembangunan manusia di NTT masih berada pada level "sedang" dimana IPM dikatakan level sedang apabila IPM bernilai antara 60 sampai 70.

Dilihat dari komponen pembentuknya, penurunan IPM di masa pandemi COVID ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) dan dimensi pengetahuan yang diwakili dengan variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat (Gambar 2.1).

Gambar 2.1

Indikator IPM dan Komponen Penyusunnya di Provinsi NTT, 2018-2020

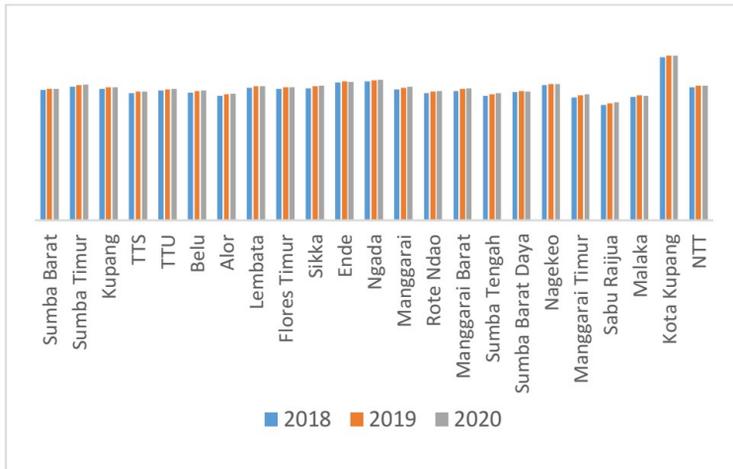


Sumber: BPS, 2021

Untuk kabupaten/kota, tiga kabupaten dengan IPM tertinggi pada tahun 2020 adalah kota Kupang (79,71), Ngada (67,88), dan Ende (67,04) dimana Kota Kupang merupakan satu-satunya kabupaten/kota di NTT yang mencapai level tinggi pada status pembangunan manusia. Sedangkan tiga kabupaten dengan IPM terendah adalah kabupaten Sabu Raijua (57,02), Malaka (60,21), dan Manggarai Timur (60,85) (Lampiran Tabel 2.1).

Gambar 2.2

IPM Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2018-2020



Sumber: BPS, 2021

B. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara.

Untuk mengevaluasi sejauh mana gambaran ketidaksetaraan gender, diperlukan sebuah indikator komposit yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Index* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

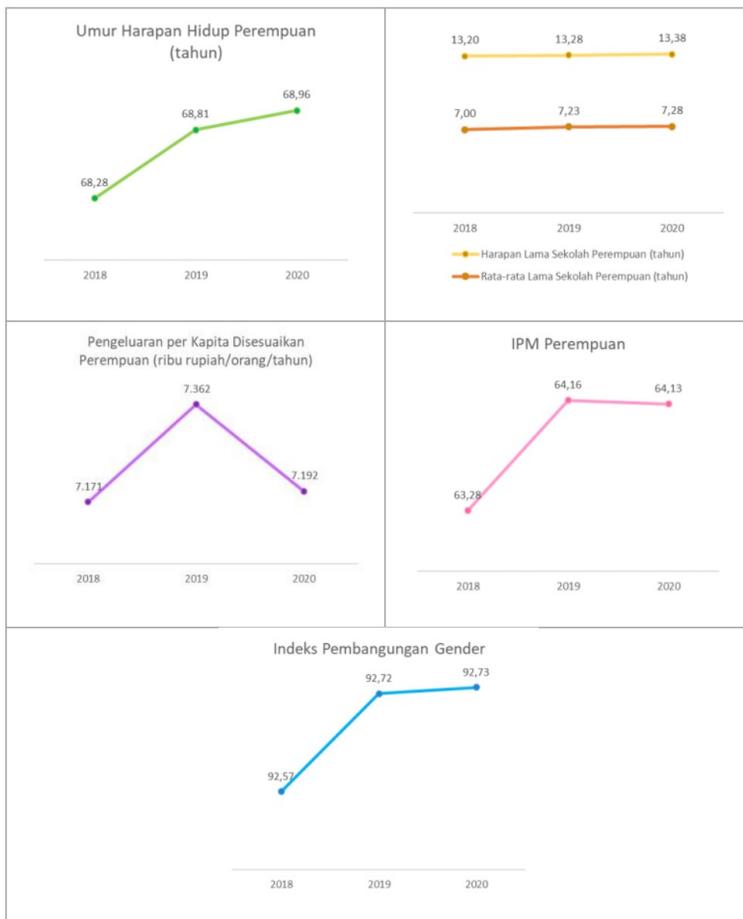
Pada penghitungan angka IPG dihitung dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Angka IPG ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Angka yang ada dapat diartikan bahwa ketika angka IPG makin mendekati angka 100, maka pembangunan gender akan semakin seimbang atau

merata. Sebaliknya, apabila angka IPG semakin menjauhi dari angka 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Angka 100 dijadikan patokan karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Gambar 2.3
Indikator IDG dan Komponen Penyusunnya di Provinsi NTT, 2018-2020

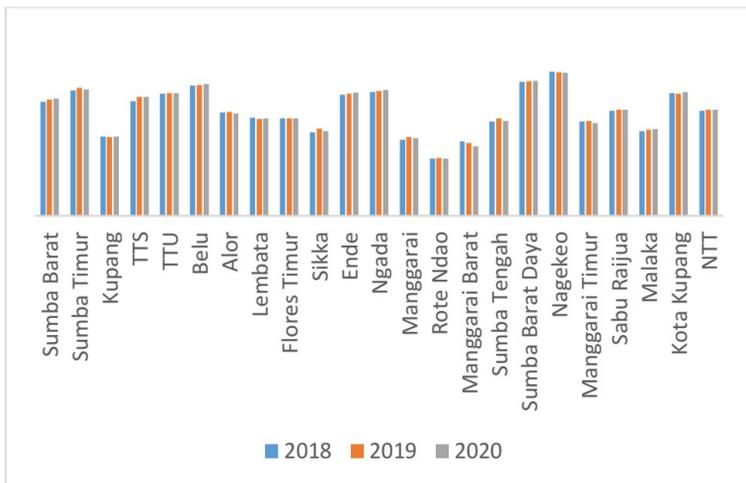


Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.3 menunjukkan perkembangan IPG Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT selama periode 2018-2020. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa IPG Provinsi NTT mengalami peningkatan. IPG Provinsi NTT pada tahun 2018 mencapai 92,57. Tahun 2019 naik 0,15 poin menjadi 92,72 dan tahun 2020 naik 0,01 poin menjadi 92,73. Dengan kata lain pembangunan gender semakin seimbang atau merata.

Selain memperhatikan perubahan angka indeksnya, mengingat IPG merupakan indeks komposit, maka perlu dikaji juga beberapa perubahan pada komponen pembentuknya. Dalam kurun waktu 2018-2020 komponen kesehatan dan pendidikan terus mengalami peningkatan. Sedangkan komponen ekonomi pada IPM perempuan di tahun 2020, sama seperti IPM keseluruhan, mengalami penurunan akibat terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan lemahnya ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat.

Gambar 2.4
IPG Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2018-2020



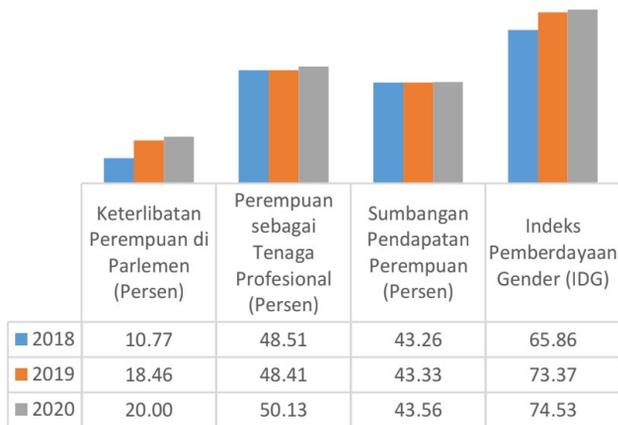
Sumber: BPS, 2021

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2020 tiga kabupaten/kota yang memiliki nilai IPG tertinggi yaitu Kabupaten Nagekeo (98,97), Sumba Barat Daya (97,62), dan Belu (97,10). Sedangkan tiga kabupaten/kota yang memiliki IPG terendah yaitu Kabupaten Rote Ndao (84,62), Manggarai Barat (86,67), dan Manggarai (88,00) (Lampiran Tabel 2.2).

C. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga memperkenalkan ukuran komposit lainnya yang juga terkait dengan gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan *power* dari sisi politik, ekonomi, pendapatan dan pengambilan keputusan. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan keputusan dilakukan proksi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Selanjutnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi. Sedangkan sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan.

Gambar 2.5
IDG dan Persentase Komponen IDG Provinsi NTT, 2018-2020



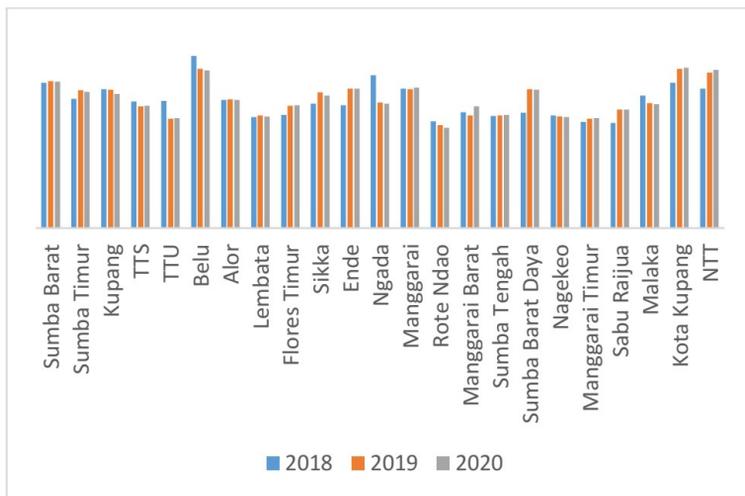
Sumber: BPS, 2021

Perkembangan IDG dan komponennya selama tahun 2018-2020 kabupaten/kota di Provinsi NTT dapat dilihat dari Gambar 2.5. Dalam kurun tiga tahun terakhir, IDG Provinsi NTT selalu mengalami peningkatan. Nilai IDG pada tahun 2018 sebesar

65,86 meningkat menjadi 73,37 di tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 74,53 di tahun 2020. Peningkatan ini terlihat pada sebagian besar komponen IDG.

Dilihat dari komponennya, keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan selama tiga tahun terakhir persentasenya terus meningkat. Demikian juga untuk komponen peran perempuan sebagai tenaga profesional, walaupun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan 0,1 persen menjadi 48,41 persen dibanding tahun 2018, namun pada tahun 2020 kembali meningkat 1,72 persen menjadi 50,13 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini mengandung pengertian bahwa peranan aktif dan daya perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mulai meningkat.

Gambar 2.6
IDG Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2018-2020



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.6 menunjukkan IDG tahun 2018-2020 mengalami perkembangan yang berbeda-beda di setiap kabupaten. Ada

yang mengalami peningkatan, ada pula yang mengalami penurunan. Tiga kabupaten/kota dengan IDG tertinggi pada tahun 2020 adalah Kota Kupang (75,61), Kabupaten Belu (74,45), dan Kabupaten Sumba Barat (69,00). Sedangkan tiga kabupaten dengan IDG terendah pada tahun 2020 adalah Kabupaten Rote Ndao (47,40), Kabupaten Timor Tengah Utara (51,76), dan Kabupaten Manggarai Timur (51,91) (Lampiran Tabel 2.3).

D. Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga adalah unit masyarakat terkecil serta memiliki kedudukan sangat strategis dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan kualitas keluarga secara holistik, mencakup kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah resiko berbagai masalah dilingkungannya. Kemampuan SDM tersebut menjadi modal dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan tentunya pencegahan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah

kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.

Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga dapat diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun berbagai indikator terkait ketahanan keluarga yang digunakan sebagai bahan kajian dan penilaian tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.

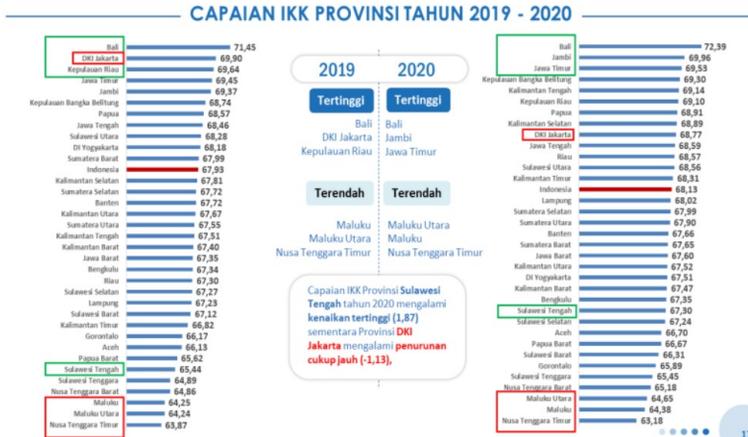
Kualitas keluarga menggunakan konsep ketahanan keluarga sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terdiri dari ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, sosial psikologi, sosial budaya dengan landasan komponen legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender.

Mengukur ketahanan dan kualitas keluarga digunakan indikator-indikator kualitas keluarga mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keerasan sosial. Angka Indeks Kualitas Keluarga disajikan pada tingkat nasional, sehingga secara umum kita dapat mengetahui kualitas dan ketahanan keluarga di setiap provinsi. Angka Indeks Kualitas Keluarga (IKK) per provinsi bukan untuk membuat

peringkat, melainkan memacu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar berupaya meningkatkan kebutuhan dasar keluarga.

Hasil pengukuran IKK tahun 2019 dan 2020, menunjukkan Provinsi NTT pada urutan ke 34 dari 34 provinsi atau dengan kata lain kualitas keluarga di Provinsi NTT dikategorikan rendah atau rentan terhadap berbagai persoalan. Indikator-indikator pada ketahanan dan kualitas keluarga bersifat *cross cutting issue*, sehingga sangat diperlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi yang holistik dan berkesinambungan. Berikut ini data IKK Provinsi tahun 2019 dan tahun 2020.

Gambar 2.7
Capaian IKK Provinsi Tahun 2019-2020



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

E. Indeks Kebahagiaan

Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh karena keterbatasan indikator ekonomi tersebut, dunia saat ini mulai memperhatikan aspek sosial dalam kemajuan pembangunan. Indikator kesejahteraan saat ini tidak hanya untuk menggambarkan kondisi kemakmuran materi (*welfare* atau *well-being*) saja, tetapi juga lebih mengarah kepada kondisi kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau kebahagiaan (*happiness*).

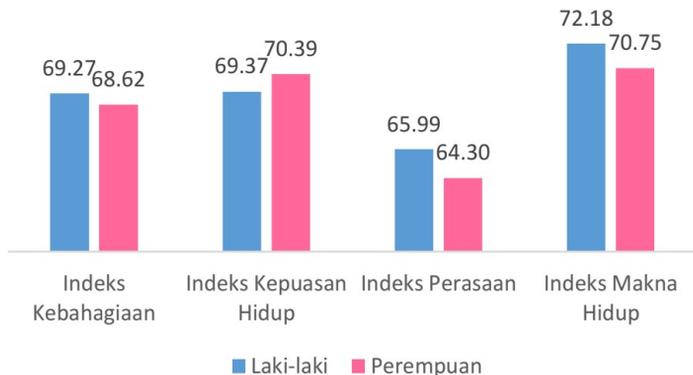
Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengikut perkembangan pemikiran internasional terkait pengukuran kesejahteraan subjektif dengan melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan instrumen pengukuran tingkat kebahagiaan. Indikator yang dibangun untuk mengukur tingkat kebahagiaan masyarakat yaitu indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affect*), dan makna hidup (*eudaimonia*). Kontribusi masing-masing dimensi terhadap indeks kebahagiaan adalah kepuasan hidup 34,80 persen, perasaan 31,18 persen, dan makna hidup 34,02 persen.

Rata-rata tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar 70,69 pada skala 0 sampai 100. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, rata-rata tingkat kebahagiaan penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebesar 68,98. Kondisi kehidupan penduduk Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan cukup bahagia pada tahun 2017, karena rata-rata indeks kebahagiaan tahun 2017 sudah di atas 50.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017 ternyata indeks kebahagiaan penduduk laki-laki (69,27) lebih tinggi daripada penduduk perempuan (68,62) (Gambar 2.7). Dapat dikatakan bahwa penduduk laki-laki lebih bahagia ketimbang penduduk perempuan. Bahkan jika dilihat dari dimensi penyusunnya, hampir semua dimensi menunjukkan penduduk laki-laki memiliki nilai lebih tinggi. Perempuan mempunyai nilai indeks lebih tinggi daripada laki-laki hanya pada dimensi kepuasan hidup. Lebih tingginya nilai indeks kebahagiaan laki-laki daripada perempuan diduga karena laki-laki mempunyai peran sosial yang lebih luas daripada perempuan. Dengan peran tersebut, laki-laki cenderung mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan pengetahuan serta pola pikir daripada perempuan. Selanjutnya dengan adanya peran tersebut, laki-laki cenderung menjadi lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru sehingga membuat mereka lebih optimis dalam menghadapi masa depan.

Gambar 2.8

Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Penyusun Indeks Kebahagiaan Penduduk NTT Menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber: Publikasi Indeks Kebahagiaan 2017 - BPS

F. Perempuan Dan Ketenagakerjaan Serta Politik

Karakteristik Lapangan Pekerjaan Perempuan

Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender. Pembangunan yang dilakukan semestinya harus berwawasan gender, baik dalam bidang ekonomi, sosial, bahkan turut mengukuhkan ketahanan ekonomi dalam keluarga maupun masyarakat. Kontribusi perempuan dalam ekonomi rumah tangga juga dalam beberapa penelitian terbukti mampu mengentaskan keluarganya dari kemiskinan. Partisipasi perempuan cukup strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

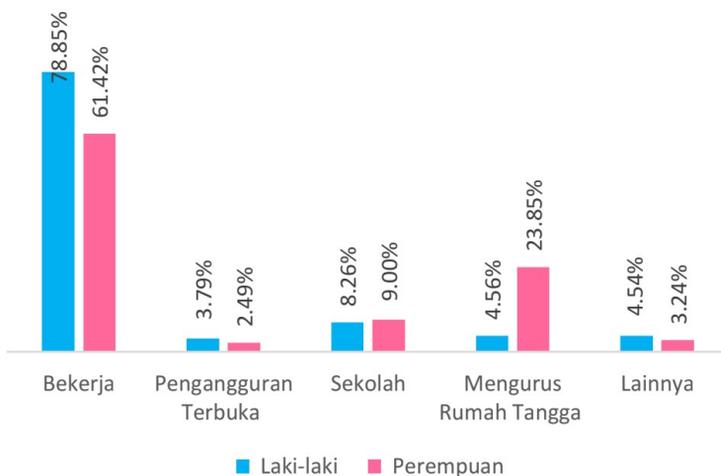
1) Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas

Kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dilihat dalam lima jenis, yaitu bekerja, pengangguran terbuka, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Penduduk dengan usia 15 tahun ke atas juga disebut sebagai penduduk usia kerja. Pada tahun 2020, hampir separuh penduduk usia kerja di NTT memiliki kegiatan bekerja, yaitu sebesar 69,98 persen. Berdasarkan gender, laki-laki memiliki kegiatan bekerja dalam seminggu terakhir lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan persentase 78,85 persen berbanding 61,42 persen. Meskipun masih lebih rendah daripada laki-laki, namun informasi ini mengindikasikan peran perempuan di dunia kerja sudah cukup signifikan (Gambar 2.8).

Selain bekerja, kegiatan yang memiliki persentase tinggi dilakukan penduduk perempuan usia kerja dalam seminggu yang lalu adalah mengurus rumah tangga dengan jumlah sebesar 23,85 persen. Persentase ini merupakan angka yang cukup tinggi

dibandingkan dengan kegiatan sekolah dan lainnya. Bagi kelompok laki-laki, meskipun persentase penduduk laki-laki usia kerja yang mengurus rumah tangga sangat kecil, yaitu hanya 4,56 persen, namun menunjukkan kegiatan mengurus rumah tangga juga dimungkinkan dilakukan oleh laki-laki (Gambar 2.8). Informasi ini menguatkan pemahaman bahwa mengurus rumah tangga buka semata-mata menjadi tugas perempuan, namun bisa dilakukan juga oleh laki-laki, atau dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.9
 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu



Sumber: Sakernas Agustus 2020 – BPS

Berdasarkan sebarannya, persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam seminggu lalu paling tinggi di Kabupaten Manggarai Timur yaitu sebesar 72,89 persen. Selain Kabupaten Manggarai Timur, kabupaten/kota dengan

persentase tertinggi di tingkat provinsi NTT lainnya adalah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 69,20 persen dan Kabupaten Alor sebesar 68,89 persen. Untuk provinsi dengan capaian persentase perempuan bekerja terendah berada di Kota Kupang dengan jumlah sebesar 47,77 persen, Kabupaten Sumba Tengah sebesar 50,76 persen, dan Kabupaten Belu sebesar 53,64 persen (Lampiran Tabel 2.4).

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Proporsi partisipasi penduduk di bidang ekonomi dapat dilihat melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Nilai TPAK dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya faktor jumlah penduduk yang bersekolah, penduduk yang memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, sebaran usia, upah/gaji yang diterima, tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan (cuti hamil, tempat menyusui, dan sebagainya). Tinggi rendahnya TPAK juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada, maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan, demikian juga sebaliknya.

Kesenjangan TPAK perempuan yang signifikan lebih rendah di bawah laki-laki ini terlihat tidak berubah dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2018, TPAK laki-laki mencapai jumlah 83,00 persen, menurun di tahun 2019 menjadi 81,31 persen dan di tahun 2020 meningkat menjadi 82,64 persen. Pada perempuan, TPAK yang dicapai di tahun 2018 hanya sebesar 60,90 persen, menurun 1,16 persen di tahun berikutnya menjadi 59,74 persen, dan di tahun 2020 meningkat 4,17 persen menjadi 63,91 persen

(Gambar 2.9). Peningkatan yang terjadi pada perempuan belum dapat mengubah kesenjangan posisi perempuan dengan laki-laki di bidang partisipasi angkatan kerja.

Gambar 2.10
TPAK Penduduk NTT Menurut Jenis Kelamin, 2018-2020



Sumber: Sakernas Agustus 2018-2020 - BPS

Berdasarkan kabupaten/kota di NTT, TPAC perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Manggarai Timur dengan capaian sebesar 75,04 persen, Kabupaten Manggarai Barat sebesar 71,34 persen dan Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 70,85 persen. Dua kabupaten/kota dengan persentase TPAC perempuan yang terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah sebesar 53,39 persen dan Kota Kupang sebesar 53,70 persen (Lampiran Tabel 2.5).

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Status pengangguran merupakan persoalan serius pada sektor ekonomi. Tingginya angka pengangguran akan beresiko pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengurangi TPT dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM masyarakat, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan peluang kerja yang bersifat kreatif dan inovatif. Jika TPT berkurang, maka beban ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga akan lebih baik. Dengan pendapatan yang baik, tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Perempuan usia angkatan kerja yang memiliki pekerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kemandirian ekonomi perempuan dapat meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) perempuan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang ada. Karena itu, TPT perempuan penting ditekan dengan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan pada perempuan.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2018-2020 menunjukkan bahwa TPT laki-laki cenderung lebih tinggi daripada TPT perempuan. Pada 2018, TPT laki-laki dan perempuan hanya memiliki selisih yang tipis dimana TPT laki-laki lebih tinggi 0,02 persen dibanding TPT perempuan (2,86 persen berbanding 2,84 persen). Namun pada tahun 2019, TPT perempuan sebesar 3,48 persen, lebih tinggi 0,59 persen daripada TPT laki-laki yang hanya sebesar 2,89 persen. Pada 2020, TPT laki-laki kembali lebih tinggi dibanding TPT perempuan dimana TPT laki-laki meningkat tajam

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 4,59 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 3,89 persen (Gambar 2.10).

Gambar 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk NTT
Menurut Jenis Kelamin, 2018-2020



Sumber: Sakernas Agustus 2018-2020 - BPS

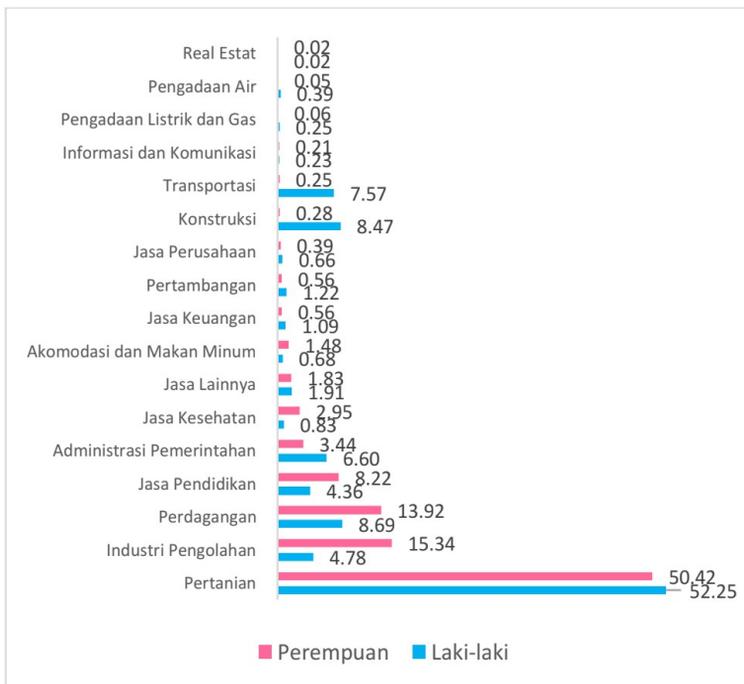
TPT perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan yang terendah di antara semua kabupaten/kota di NTT dengan TPS sebesar 1,38 persen. Kabupaten lainnya yang memiliki TPT terendah yaitu Kabupaten Alor dan Kabupaten Manggarai dengan angka TPT sebesar 1,75 persen dan 1,85 persen. TPT perempuan tertinggi terdapat di Kota Kupang yang mencapai jumlah sebesar 11,04 persen (Lampiran Tabel 2.6).

4) Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan utama yang tersedia dan diakses oleh perempuan dan laki-laki kerap kali masih menunjukkan stereotipe gender. Jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan karakter maskulin tampak didominasi oleh laki-laki ketimbang

perempuan. Sementara jenis-jenis pekerjaan yang dianggap lebih sesuai dilakukan perempuan juga terlihat didominasi oleh perempuan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, kesenjangan terbesar terlihat pada kategori konstruksi dimana laki-laki bekerja pada kategori tersebut sebanyak 8,47 persen, sementara perempuan hanya 0,28 persen. Kesenjangan gender pada jenis pekerjaan juga dapat terlihat pada kategori industri pengolahan dimana perempuan yang bekerja pada kategori tersebut sebanyak 15,34 persen sementara laki-laki hanya 4,78 persen (Gambar 2.11).

Gambar 2.12
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTT, 2020



Sumber: Sakernas Agustus 2020 - BPS

Persentase terbesar lapangan pekerjaan utama pada perempuan dan laki-laki sama-sama berada pada kategori pertanian, yaitu sebesar 50,42 persen untuk perempuan dan 52,25 persen untuk laki-laki. Informasi ini sejalan dengan pernyataan bahwa Provinsi NTT adalah provinsi yang masih sangat mengandalkan sektor agraris karena lebih dari setengah penduduknya, baik laki-laki maupun perempuan bekerja di sektor pertanian. Secara spesifik pada kelompok perempuan, selain sektor pertanian, perempuan juga banyak yang bekerja di sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 15,34 persen dan sektor perdagangan sebesar 13,92 persen. Persentase terkecil lapangan pekerjaan perempuan berada pada kategori real estat yaitu sebesar 0,02 persen, disusul kategori pengadaan air sebesar 0,05 persen, dan pengadaan listrik dan gas sebesar 0,06 persen.

5) Status Pekerjaan Utama

Pada tahun 2020, status pekerjaan utama pada perempuan dan laki-laki menunjukkan pola yang berbeda. Berdasarkan Sakernas Agustus 2020, persentase penduduk perempuan di NTT yang bekerja sebagai pekerja keluarga menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 39,47 persen, sangat signifikan besar jika dibanding dengan penduduk laki-laki yang hanya sebesar 14,36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa status pekerjaan utama dalam kategori pekerja keluarga menunjukkan keadaan tenaga kerja di NTT masih dipengaruhi oleh cara pandang yang membakukan peran gender. Peranan sentral perempuan dalam keluarga dianggap sebagai tenaga kerja siap pakai dalam membantu kepala rumah tangga atau anggota keluarga lainnya dalam memperoleh pendapatan.

Pada status pekerjaan dengan adanya buruh, baik buruh yang dibayar tetap maupun tidak tetap menunjukkan laki-laki

lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sementara untuk status berusaha sendiri, antara laki-laki dan perempuan hanya berbeda 0,35 persen (19,00 persen banding 18,65 persen). Situasi ini mengindikasikan usaha atau kerja yang dilakukan perempuan dan laki-laki masih mengalami kesenjangan modal. Laki-laki lebih memiliki modal untuk berusaha dengan melibatkan buruh ketimbang perempuan (Gambar 2.12).

Gambar 2.13
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTT, 2020



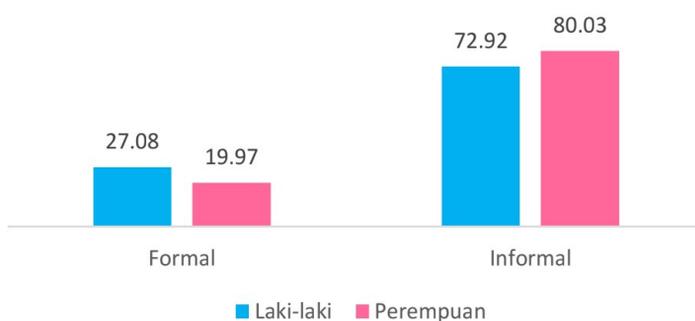
Sumber: Sakernas Agustus 2020 - BPS

6) Pekerja di Sektor Informal dan Formal

Bekerja di sektor informal merupakan peluang kerja alternatif yang memberi harapan pendapatan yang tidak selalu lebih kecil dibandingkan kerja di sektor formal. Dibandingkan sektor formal, ekonomi pada sektor informal cenderung lebih mudah dimasuki dan diciptakan. Oleh karena itu, partisipasi perempuan di bidang kerja informal menjadi peluang tumbuhnya ekonomi kreatif yang inovatif dan mandiri bagi upaya pemberdayaan perempuan.

Pada tahun 2020, penduduk NTT, baik laki-laki maupun perempuan, lebih banyak bekerja pada sektor informal dibanding sektor formal. Persentase perempuan di NTT yang bekerja di sektor formal hanya sebesar 19,97 persen sedangkan 80,03 persen perempuan di NTT bekerja di informal (Gambar 2.13). Jika dipilah karakteristik pekerja informal perempuan di NTT, sebagian besar perempuan di NTT merupakan pekerja tidak dibayar, yang umumnya adalah pekerja keluarga, dimana pekerja keluarga tersebut membantu mendapatkan penghasilan dengan membantu anggota rumah tangga lainnya, jumlahnya mencapai 39,47 persen dari total seluruh perempuan bekerja di NTT. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan global dalam mendorong perempuan menjadi agen perubahan ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan kecakapan dan kompetensi perempuan pekerja keluarga di NTT agar dapat berusaha atau bekerja dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi keluarga.

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTT, 2020



Sumber: Sakernas Agustus 2020 – BPS

7) Pekerja Non Prosedural

Tenaga kerja non prosedural merupakan istilah pengganti untuk penyebutan pekerja ilegal, yang mulai digunakan oleh Indonesia sejak tahun 2017 melalui Surat Edaran Dirjen Kementerian Dirjen Imigrasi No. IMI.0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural sebagai bentuk penyebutan terhadap TKI yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017). Pada tahun yang sama melalui Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia penyebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Republik Indonesia, 2017). Sejak diberlakukan keduanya, Indonesia menggunakan istilah PMI non prosedural dalam penyebutan terkait tindakan yang mengindikasikan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja Indonesia di negara lain.

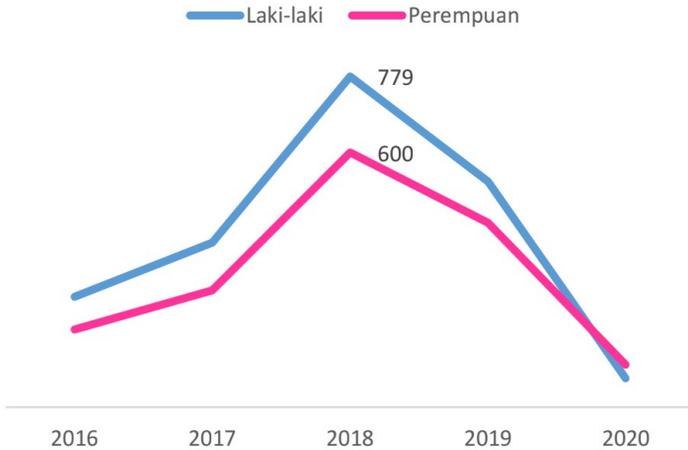
Pekerja non-prosedural sejauh ini rentan menjadi korban *human trafficking*. Oleh karenanya, perlu adanya pembinaan dan perlindungan para PMI. Pemerintah pun terus berupaya menekan Jumlah PMI non prosedural melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu dengan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus. Satgas ini dibentuk sejak tahun 2012 dengan nama Satuan Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah debarkasi/embarkasi. Hal ini didasari dari Rencana Strategis (renstra) Kemnaker serta amanat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri dalam upaya peningkatan perlindungan PMI. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2020, nama Satgas yang sebelumnya adalah Satuan tugas Pencegahan TKI Non Prosedural berganti nama dengan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal itu agar cakupan

tugas dan fungsi Satgas ini dapat lebih luas sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada tahun ini, keberadaan Satgas tidak hanya berada di wilayah debarkasi/embarkasi, namun juga berada di wilayah daerah asal PMI dengan total sebanyak 22 wilayah, yaitu Sumatera Utara, Tanjung Balai, Batam, Kepulauan Riau, Dumai, Tanjung Jabung Timur, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan barat, Sanggau, Nunukan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Pare-Pare, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data dari Satgas PPMI Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau Kupang, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah PMI Non prosedural cenderung terus menurun. Pada periode tersebut, jumlah PMI Non Prosedural yang berhasil dicegah oleh satgas tertinggi di tahun 2018 sejumlah 779 laki-laki dan 600 perempuan. Jumlah ini terus menurun, hingga pada tahun 2020 hanya sejumlah 68 laki-laki dan 100 perempuan. Penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020, tentunya tidak terlepas dari penerapan protokol kesehatan terkait Pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak penerbangan dan pelayaran ditunda/dibatalkan.

Gambar 2.15
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi NTT, 2020



Sumber: Satgas PPMI Nusa Tenggara Timur, 2021

Pada tabel 2.14 dapat dilihat selama periode lima tahun tersebut daerah asal calon tenaga kerja non prosedural yang berhasil dicegah, paling banyak berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan sejumlah 980 orang, kemudian disusul Malaka dan Belu masing-masing 728 dan 614 orang. Sementara kabupaten yang sama sekali tidak ditemukan adanya calon tenaga kerja non prosedural adalah Kabupaten Sikka dan Manggarai Barat.

Selain dari daerah asal calon tenaga kerja non prosedural, pada tabel 2.14 juga dapat dilihat daerah yang paling banyak dituju yaitu Malaysia untuk kategori luar negeri sejumlah 39 laki-laki dan 40 orang perempuan. Sementara untuk daerah lain di Indonesia, daerah yang paling banyak dituju oleh calon tenaga kerja ialah Kalimantan Tengah sejumlah 568 laki-laki dan 168 perempuan.

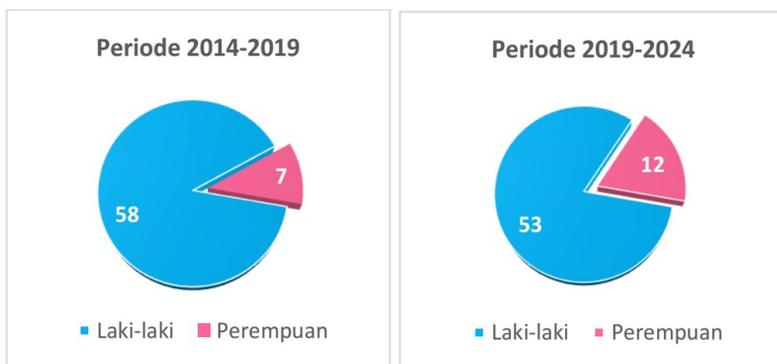
Perempuan di Parlemen

Persentase keterlibatan perempuan NTT di parlemen cenderung terus meningkat. Hal tersebut dapat terlihat pada hasil pemilihan anggota DPR-RI dan DPD-RI periode 2019-2024 asal NTT. Dari 13 orang yang terpilih sebagai anggota DPR-RI, 2 di antaranya merupakan perempuan. Demikian pula dalam pemilihan DPD-RI sebanyak 4 orang berasal dari NTT, 2 di antaranya merupakan perempuan. Partisipasi representasi ini meningkat jika dibandingkan pemilihan periode sebelumnya, yaitu tahun 2014-2019, dimana tidak satu pun perempuan terpilih baik dalam pemilihan anggota DPR-RI maupun DPD-RI. Dengan begitu, diharapkan suara perempuan NTT lebih terdengar dalam memperjuangkan nasib daerahnya di kancah nasional sehingga kebijakan nasional akan berdampak secara signifikan di Provinsi NTT. Demikian juga, fokus perhatian pemerintah pusat untuk membangun wilayah timur khususnya NTT semakin terarah setelah bertahun-tahun mengalami ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat.

Di tingkat regional, jumlah anggota DPRD Provinsi berjenis kelamin perempuan yang terpilih pada periode 2019-2024 sebanyak 12 dari 65 anggota legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi sebesar 18,46 persen dalam keterwakilan legislatif di tingkat DPRD Provinsi. Apabila dibandingkan dengan periode pemilihan sebelumnya yaitu 2014-2019, dimana jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 7 orang, maka jumlah anggota DPRD perempuan meningkat 71,43 persen dengan kontribusi keterwakilan perempuan dalam legislatif sebesar 10,77 persen (Gambar 2.15). Selain itu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di periode 2019-2024 merupakan seorang perempuan. Dengan demikian,

ruang politik di wilayah kepulauan ini, dalam tatanan legislatif semakin terbuka lebar bagi kaum perempuan sehingga aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan dapat diperjuangkan dengan maksimal.

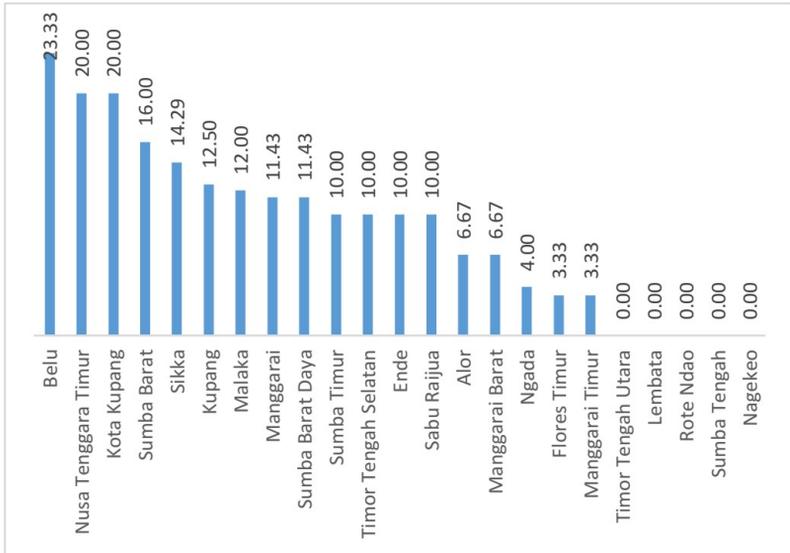
Gambar 2.16
Jumlah Anggota DPRD Provinsi NTT Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Statistik Politik dan Keamanan - BPS

Berbeda dengan geliat politik perempuan dalam tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, masih terdapat lima kabupaten yang tidak memiliki perwakilan anggota perempuan di DPRD tingkat Kabupaten/Kota. Jika melihat Gambar 2.16, kabupaten yang tidak memiliki perwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota di antaranya Timor Tengah Utara, Lembata, Nagekeo, Rote Ndao, dan Sumba Tengah, sedangkan jumlah keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota se-NTT paling banyak berada di Kota Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan. Namun, proporsi kontribusi perempuan terhadap kuota masing-masing kabupaten/kota paling besar terdapat di Kabupaten Belu 23,3 persen, Kota Kupang 20 persen, dan Kabupaten Sumba Barat 16 persen.

Gambar 2.17
 Persentase Keterlibatan Perempuan menjadi Anggota DPRD
 Kabupaten/Kota se-NTT, 2020



Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2021 - BPS

Bab 3



Profil Anak

Profil Kependudukan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
2020



Jumlah Kematian Bayi 2020

846

Jumlah Kematian Balita 2020

946

Kepemilikan Akte Penduduk <17 tahun

63.33 %



BAB III

PROFIL ANAK

A. Kajian Indikator-Indikator Pemenuhan Hak Anak

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan ratifikasi Indonesia pada tahun 1990 Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal (1) Ayat (1) juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Negara mengatur perlindungan anak dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002. Pelaksanaan kegiatan kelangsungan anak berlangsung dari periode kelahiran hingga tumbuh kembang anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak di masa ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, dan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak juga bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tua, namun masyarakat dan pemerintah. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak ini ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan isu global. Isu ini termasuk dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya Tujuan 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua umur. Diharapkan pada tahun 2030, angka kematian ibu, bayi baru lahir, dan balita dapat berkurang. Begitu juga angka kematian akibat penyakit tidak menular. Pada tahun tersebut juga diharapkan agar jaminan terhadap akses universal layanan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi terlaksana.

Berikut adalah kelangsungan hidup anak dilihat dari berbagai aspek kesehatan seperti jumlah angka kematian bayi, berat badan bayi, inisiasi menyusui dini, imunisasi dan status gizi balita, serta aspek hukum yaitu kepemilikan akta kelahiran:

1. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase kelahiran sampai masa belum mencapai satu tahun dalam 1.000 kelahiran hidup. Data AKB di Indonesia berasal dari berbagai sumber, yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), dan Sensus Penduduk (SP). Dalam beberapa tahun terakhir AKB di Indonesia telah banyak mengalami penurunan cukup besar. AKB nasional pada tahun 2007 sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007), pada tahun 2012 menurun menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

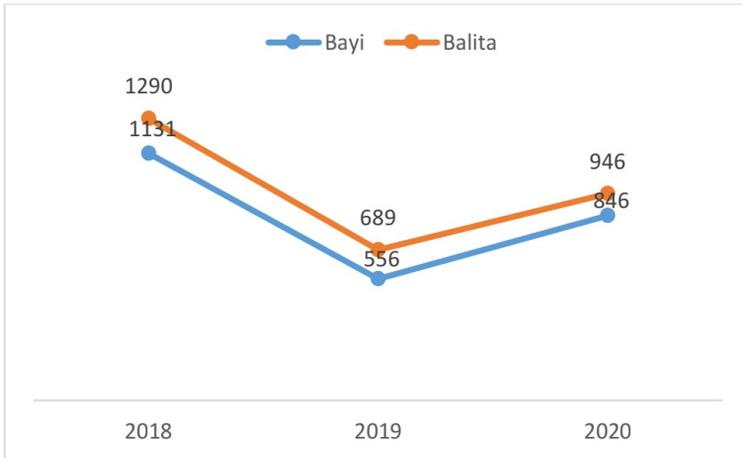
Untuk Provinsi NTT, AKB pada tahun 2007 sebesar 57 per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dari AKB nasional. Sedangkan pada tahun 2012, AKB menjadi 45 per 1.000 kelahiran hidup di provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika dilihat dari jumlah kematian bayi yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, selama 2018 sampai 2020 jumlah kematian bayi mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2019, jumlah kematian bayi sebanyak 556 bayi, menurun jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 1131 bayi. Kemudian pada tahun 2020, jumlah kematian bayi kembali meningkat menjadi 846 (Gambar 3.1). Berdasarkan kabupaten dan kota, jumlah kematian bayi tertinggi pada tahun 2020 terdapat di Timor Tengah Selatan yaitu sebanyak 88 bayi (Lampiran Tabel 3.1).

Kelangsungan hidup anak setelah bayi dilanjutkan pada tahap balita, untuk itu menjadi penting kesehatan anak pada masa balita. Indikator Angka Kematian Balita juga menjadi salah satu indikator kesehatan anak. Angka kematian balita menggambarkan tingkat peluang untuk meninggal pada fase antara kelahiran dan sebelum usia lima tahun serta permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular, dan kecelakaan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018 sampai 2020 jumlah kematian balita mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah kematian balita sebesar 1.290 balita, tahun 2019 menurun menjadi 689 balita dan naik kembali menjadi 946 balita di tahun 2020 (Gambar 3.1). Berdasarkan kabupaten dan kota, jumlah kematian balita tertinggi pada tahun 2020 terdapat di Timor Tengah Selatan yaitu sebanyak 106 balita (Lampiran Tabel 3.1).

Gambar 3.1
Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Nusa Tenggara Timur,
2018-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT

2. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

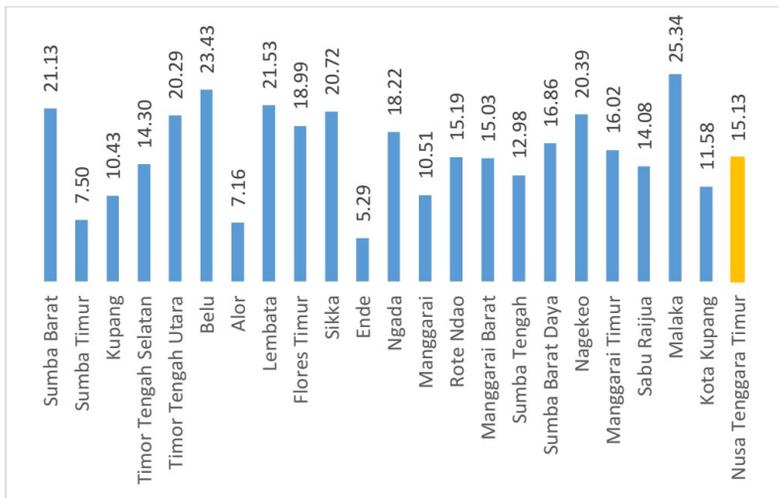
Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2,5 kg tanpa memandang masa kehamilan pada saat dilahirkan. Bayi BBLR bisa berdampak pada masa pertumbuhannya hingga dewasa. Risiko yang paling besar adalah *stunting* atau perawakan pendek. *Stunting* tidak hanya menghasilkan anak pendek, namun secara intelektual juga tidak mampu bersaing dengan anak-anak yang terlahir dengan berat badan normal dan terpenuhi gizinya di masa 1.000 hari pertama kehidupan. Dampak jangka panjang dari BBLR adalah risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, atau penyakit jantung saat dewasa.

Berdasarkan data Susenas Maret 2020, persentase ibu di NTT yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dimana anak lahir hidup terakhir dilahirkan dengan berat badan

kurang dari 2,5 kg yaitu sebesar 15,13 persen. Angka tersebut masih berada di atas angka nasional yaitu 11,37 persen. Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota di NTT, kabupaten dengan persentase BBLR tertinggi yaitu pada Kabupaten Malaka (25,34 persen). Sedangkan kabupaten dengan persentase BBLR terendah yaitu pada Kabupaten Ende (5,29 persen) (Gambar 3.2).

Gambar 3.2

Persentase Ibu yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Kabupaten/Kota, 2020



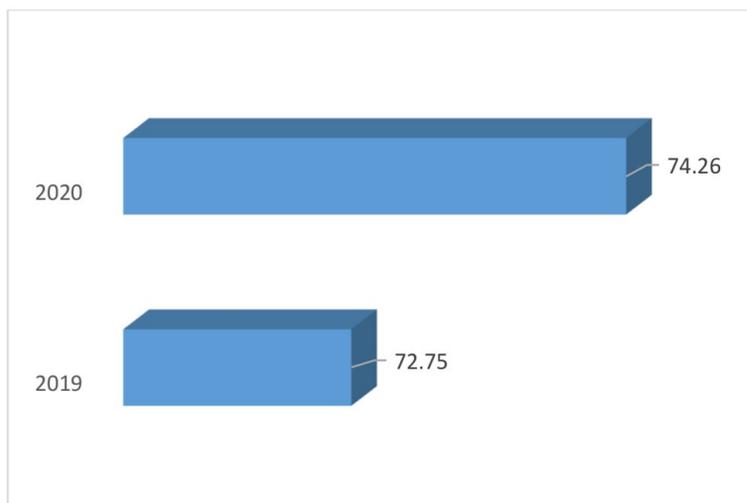
Sumber: Susenas Maret 2020 - BPS

3. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusui segera dalam 1 (satu) jam pertama setelah lahir. Bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibunya, bayi dibiarkan setidaknya selama 1 (satu) jam di dada ibu, sampai bayi menyusui sendiri. Praktik IMD sangat bermanfaat untuk bayi karena bayi akan mendapatkan kolostrum atau ASI yang pertama dihasilkan oleh ibu. Susu ini kaya akan sel imun dan antibodi sehingga dapat meningkatkan daya tahan bayi. Selain itu, adanya sentuhan kulit langsung (*skin-to-skin contact*) selama IMD juga dapat menjadi momen pengenalan untuk memperkuat ikatan batin ibu dengan bayi. Bayi pun bisa merasa semakin nyaman dan dekat dengan ibu, karena bayi bisa terus didekap dan mendengar detak jantung ibu sewaktu menyusui.

Data IMD pada Susenas didapatkan dari ibu yang melahirkan anak lahir hidup dalam 2 (dua) tahun terakhir dan anak lahir hidup yang terakhir dilahirkan dilakukan IMD kurang dari 1 (satu) jam setelah dilahirkan. Pada Gambar 3.3 menunjukkan jika pada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 sampai 2020 angka persentase ibu yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dilakukan inisiasi menyusui dini (IMD) kurang dari satu jam setelah dilahirkan relatif meningkat. Tahun 2019 persentase ibu yang melakukan IMD sebesar 72,75 persen, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 74,26 persen.

Gambar 3.3
Persentase Ibu yang Melakukan IMD Kurang dari Satu Jam Setelah Dilahirkan di NTT, 2019-2020



Sumber: Susenas Maret 2019-2020 - BPS

4. Imunisasi

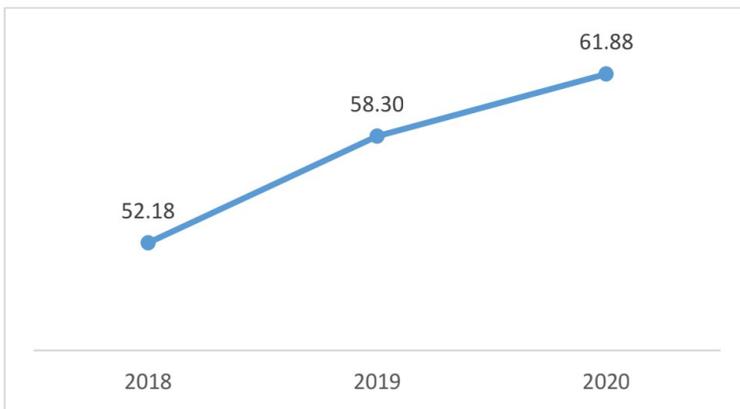
Salah satu target dari TPB tujuan 3, yaitu target 3.2 adalah pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal. Pemberian imunisasi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian target tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat pemberian imunisasi merupakan salah satu bentuk intervensi kesehatan publik yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memberantas penyakit infeksi yang mematikan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 130 menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Tujuan dilakukan

imunisasi pada anak adalah untuk melindungi anak dari berbagai penyakit. Imunisasi dasar lengkap yang dicakup meliputi imunisasi *Bacillus Calmete Guerin* (BCG) sebanyak 1 (satu) kali, *Diphtheria Pertusis Tetanus* (DPT) sebanyak 3 (tiga) kali, polio sebanyak 3 (tiga) kali, Hepatitis B sebanyak 3 (tiga) kali, dan imunisasi campak sebanyak 1 (satu) kali. Idealnya, anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap setelah berumur 12 bulan.

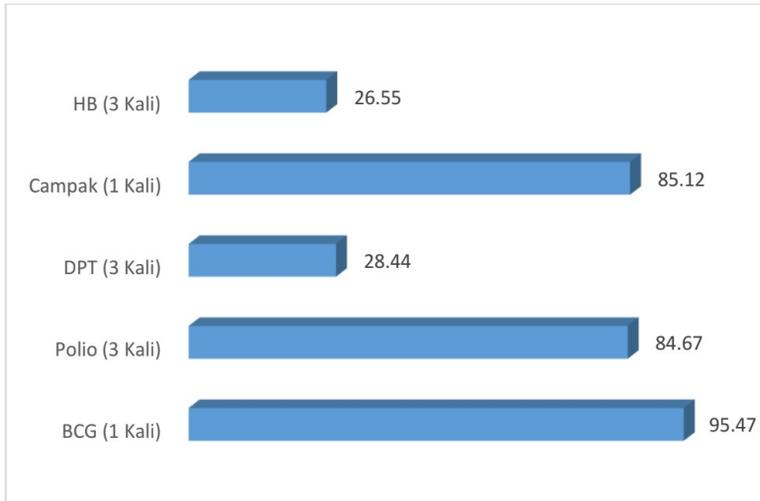
Pada tahun 2020, 61 sampai 62 dari 100 anak berumur 12-23 bulan sudah menerima imunisasi dasar lengkap (61,88 persen). Angka tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 58,30 persen dan 2018 sebesar 52,18 persen (Gambar 3.4). Apabila dilihat dari jenis imunisasi yang diterima, persentase anak umur 12-23 bulan di NTT yang telah menerima imunisasi BCG sebesar 95,47 persen, imunisasi polio 3 kali sebesar 84,67 persen, imunisasi DPT 3 kali sebesar 28,44 persen, imunisasi campak 1 kali sebesar 85,12 persen, dan imunisasi HB sebesar 26,55 persen (Gambar 3.5).

Gambar 3.4
Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di NTT, 2018-2020



Sumber: Susenas Maret 2018-2020 - BPS

Gambar 3.5
Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar
Lengkap Menurut Jenis Imunisasi di NTT, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020 - BPS

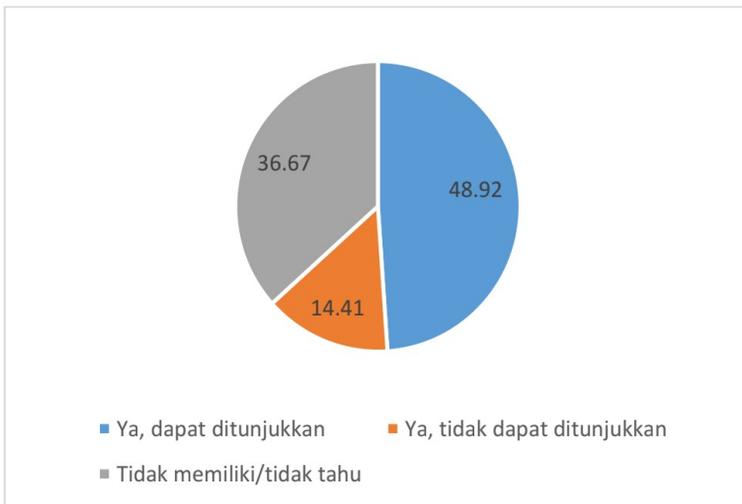
5. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Akta menjadi bukti terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Jika identitas anak tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, maka secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Tidak adanya bukti diri, kemungkinan akan ada penyalahgunaan identitas dan semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak.

Kepemilikan akta kelahiran untuk anak 0-17 tahun di Nusa Tenggara Timur masih rendah. Pada tahun 2020, hanya sebesar

48,92 persen dari penduduk 0-17 tahun yang memiliki akte kelahiran dapat menunjukkannya, sedangkan 14,41 persen mengaku memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Sedangkan penduduk usia 0-17 tahun menurut Susenas 2020, sebanyak 36,67 persen tidak memiliki/tidak tahu mengenai kepemilikan akta kelahiran (Gambar 3.6). Rendahnya kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan.

Gambar 3.6
Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020 - BPS

B. Kajian Anak dan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah Anak

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Jenjang pendidikan juga merupakan salah satu aspek perlindungan bagi hak anak atas perolehan pendidikan. Indikator pendidikan yang umum digunakan dalam mengukur tingkat partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur dapat diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Ketersediaan indikator pendidikan ini secara runtun dan terpilah merupakan masukan yang sangat penting dalam mengukur capaian program pembangunan di bidang pendidikan.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

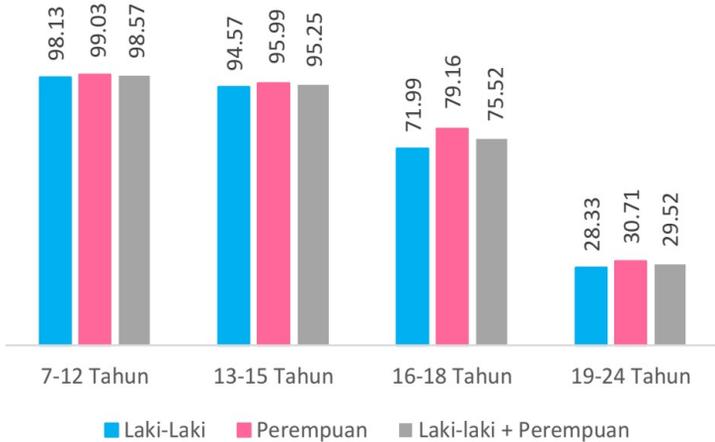
Program pemerintah dengan mencanangkan wajib belajar sembilan tahun dimaksudkan sebagai upaya agar penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah dengan harapan agar buta huruf di usia sekolah dapat ditekan. Ukuran untuk mengetahui anak-anak pada umur sekolah masih tetap sekolah atau tidak sekolah lagi dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya murid kelompok usia jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Batasan umur yang diterapkan dalam perhitungan ini adalah sesuai yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu untuk usia Sekolah Dasar 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun SMA 16-18 tahun dan perguruan tinggi 19-24 tahun.

Gambar 3.7 menyajikan APS Provinsi NTT tahun 2020 menurut usia sekolah dan jenis kelamin. Dari gambar tersebut

terlihat bahwa semakin tinggi kelompok usia jenjang sekolah maka semakin kecil nilai APS. APS kelompok usia SD (7-12 tahun) pada tahun 2020 nilainya mendekati 100 persen, yaitu sekitar 98,57 persen. Artinya bahwa kurang lebih satu persen penduduk dalam kelompok umur ini yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan. Pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolah penduduk NTT terlihat sedikit lebih rendah jika dibanding kelompok umur yang lebih muda (95,25 persen). Pada kelompok umur yang lebih tinggi, partisipasi sekolah penduduk NTT menunjukkan kecenderungan penurunan. APS pada kelompok usia SMA 16-18 tahun yaitu 75,52 persen. Sedangkan APS pada kelompok usia 19-24 tahun sebesar 29,52 persen. Hal ini berarti hanya ada tiga dari sepuluh penduduk NTT yang berumur 19-24 tahun yang sementara bersekolah.

Menurut jenis kelamin, terlihat partisipasi penduduk perempuan pada semua kelompok usia setara bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Bahkan perbedaan paling tinggi antara APS perempuan dengan laki-laki terdapat pada kelompok usia 16-18 tahun dimana APS perempuan lebih tinggi 7,17 persen dibanding APS laki-laki.

Gambar 3.7
 APS Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin
 Di Provinsi NTT Tahun 2020



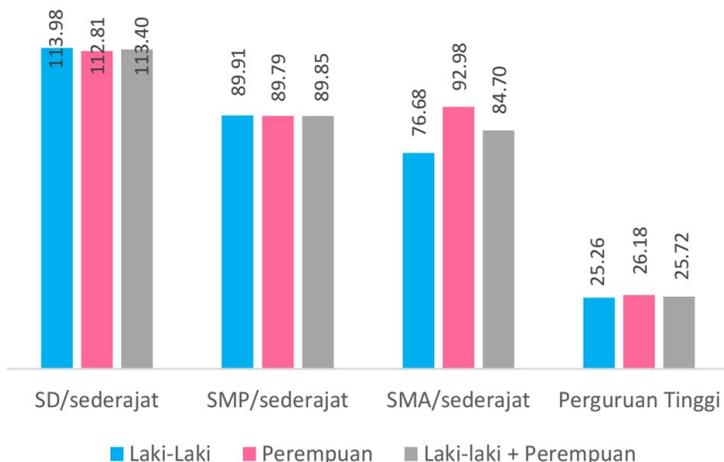
Sumber: Susenas Maret 2020 - BPS

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan proporsi jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) terhadap jumlah penduduk yang usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika jumlah populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya siswa yang masuk suatu jenjang sekolah terlalu dini dibandingkan usianya, atau sebaliknya, lebih lambat dibandingkan usianya, serta adanya pengulangan kelas oleh siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang

diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Gambar 3.8
APK Penduduk NTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin,
2020



Sumber: Susenas Maret 2020 - BPS

Gambar 3.8 memperlihatkan APK jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai SMA/ sederajat. APK jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 113,40 persen, APK SMP/ sederajat sebesar 89,85 persen, dan APK SMA/ sederajat sebesar 84,70 persen. APK pada jenjang pendidikan SD/ sederajat melebihi angka 100 persen menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar kelompok umur 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada 7-12 tahun. Banyak hal bisa menjadi alasan, antara lain beberapa orang tua terkadang mendaftarkan anaknya yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, angka mengulang kelas yang masih tinggi, dan sebagainya.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga akan semakin rendah.

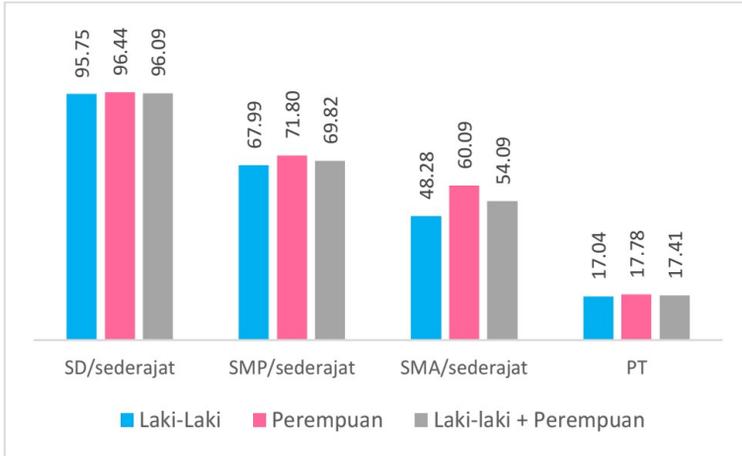
Menurut jenis kelamin, partisipasi penduduk perempuan pada semua kelompok usia terlihat setara dibandingkan penduduk laki-laki. Bahkan APK penduduk perempuan pada jenjang pendidikan SMA jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki dimana APK perempuan lebih tinggi 16,30 persen dibanding APK laki-laki.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator lain yang dihasilkan dalam publikasi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Gambar 3.9 memperlihatkan APM jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai dengan APM jenjang SMA/ sederajat di Provinsi NTT. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. APM SD/ sederajat adalah sebesar 96,09 persen. Hal ini berarti dari semua anak berusia 7-12 tahun, 96,09 persennya bersekolah di SD/ sederajat.

Gambar 3.9
 APM Penduduk NTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin,
 2020



Sumber: Susenas Maret 2020 - BPS

Berdasarkan gender, APM untuk setiap jenjang pendidikan lebih banyak penduduk perempuan yang bersekolah tepat umur dibandingkan penduduk laki-laki. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender bukan menjadi masalah dalam pembangunan bidang pendidikan di NTT. Namun, terdapat hal menarik yang terjadi pada APM jenjang SMA sederajat dimana APM perempuan lebih tinggi.

d. Buta Huruf dan Putus Sekolah

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan baca-tulis yang baik, maka akses terhadap pengetahuan semakin terbuka. Salah satu indikator untuk melihat pencapaian indikator dasar pendidikan adalah angka buta huruf. Angka buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Gambar 3.10, dalam 2 tahun terakhir angka buta huruf setiap tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2020, angka buta huruf penduduk Provinsi NTT mencapai 1,11, turun 0,09 poin dari tahun 2019. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan gender, angka buta huruf pada penduduk perempuan lebih rendah daripada penduduk laki-laki.

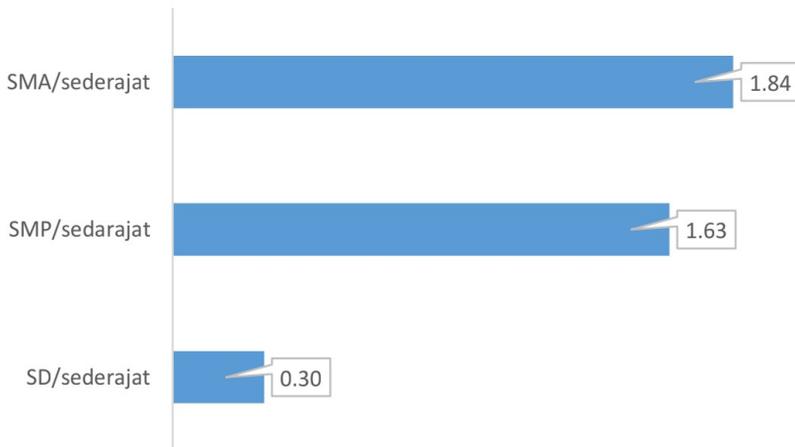
Gambar 3.10
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun
Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi NTT, 2019-2020



Sumber: Susenas Maret 2019-2020 - BPS

Dalam rangka memastikan kualitas dan inklusivitas pendidikan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 20 persen dari APBN di sektor pendidikan. Dengan begitu, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Namun, terlihat bahwa masih terdapat penduduk yang putus sekolah, baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, maupun SMA/ sederajat (Gambar 3.11)

Gambar 3.11
Angka Putus Sekolah di Provinsi NTT, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020-BPS

Pada tahun 2020, 3 dari 1.000 penduduk NTT putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMP/ sederajat, 16 di antaranya harus putus sekolah. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SMA/ sederajat berbeda tipis

dengan SMP/ sederajat dimana 18 dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMA/ sederajat putus sekolah.

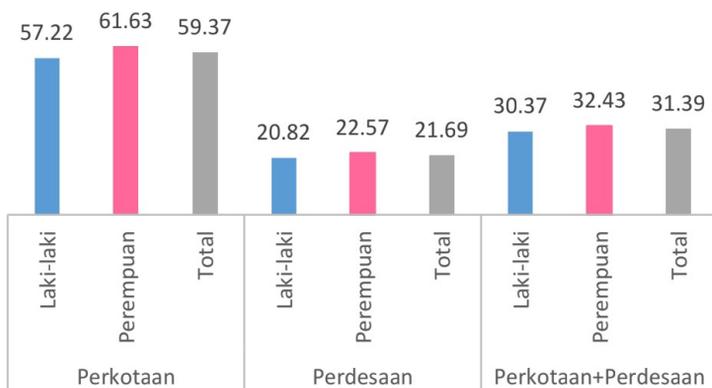
e. Penggunaan Internet

Kehidupan manusia pada era digital ini tidak dapat dipisahkan lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah keberadaan teknologi dan koneksi internet yang tentunya dapat mendukung berbagai bidang kehidupan manusia mulai pemerintahan, perekonomian, sosial, hingga pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi dan internet memiliki peran penting sebagai media penunjang sistem kurikulum sekolah. Terlebih di masa pandemi saat ini, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan *School From Home* (SFH) yaitu kegiatan pembelajaran yang dialihkan dari tatap muka menjadi daring karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara langsung di sekolah. Kehadiran internet memungkinkan para siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan materi bahkan melakukan komunikasi dengan guru atau dosen melalui fasilitas e-mail atau berbicara melalui fasilitas *teleconference* (*video-conference*).

Pada Gambar 3.12 menunjukkan bahwa di tahun 2020 sebanyak 31,39 persen atau sekitar tiga dari sepuluh siswa di NTT umur 5-24 tahun yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir. Hal ini menunjukkan masih rendahnya persentase siswa di NTT yang mengakses internet. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya sulitnya mendapatkan sinyal internet, keterbatasan media/fasilitas belajar dari rumah, dan lain sebagainya. Berdasarkan tipe daerah, penggunaan internet oleh siswa di perkotaan lebih tinggi dibandingkan siswa di perdesaan (59,37 persen berbanding 21,69 persen). Hal ini wajar mengingat akses internet di daerah perkotaan jauh lebih mudah

dibandingkan di perdesaan. Sedangkan berdasarkan gender, persentase antara siswa laki-laki dengan perempuan hanya berbeda tipis dimana persentase siswa perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki.

Gambar 3.12
 Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi NTT, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020 - BPS

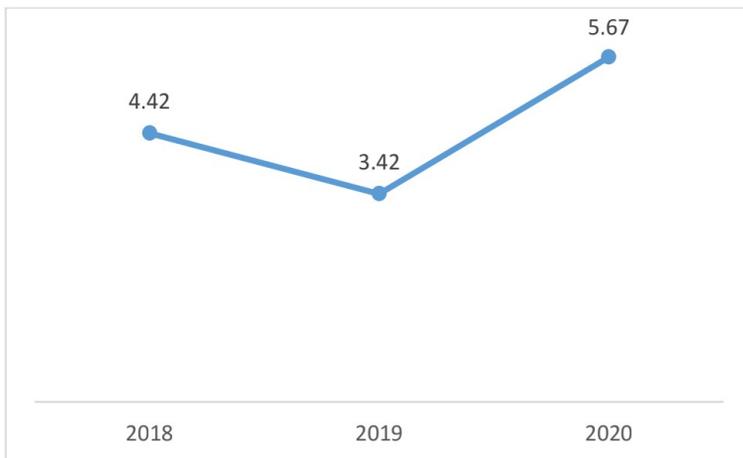
C. Kajian Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan isu penting di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan adalah dari sisi perlindungan anak, perkembangan anak, dan dampak mikro dan makro dari sisi ekonomi dan pasar tenaga kerja jika terdapat pekerja anak. Dampak mikro terkait dengan keluarga dari pekerja anak tersebut, dimana pekerja anak biasanya berasal dari keluarga miskin. Anak bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga, karena jika tidak bekerja maka mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya. Kondisi tersebut menunjukkan ketidakberdayaan sang anak. Sementara dampak makro terkait dengan tingkat pengangguran serta tingkat upah pekerja dewasa. Upah dari pekerja anak biasanya lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja dewasa, hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi tingkat pengangguran, karena permintaan pasar kerja terhadap tenaga kerja dewasa menjadi semakin rendah.

Pekerja anak menurut konsep BPS adalah penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Konsep anak-anak yang bekerja disini merujuk kepada anak-anak berusia 10-17 tahun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi menurut konsep *International Conference of Labour Statistician* (ICLS) 13, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Anak-anak yang membantu ibu-ibu mereka melakukan pekerja rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci piring, dan lainnya (bukan merupakan kegiatan ekonomi) tidak dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Sementara, anak-anak yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau membantu anggota rumah tangganya yang lain untuk

melakukan pekerjaan apa pun untuk mendapatkan uang, tanpa melihat apakah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan berbahaya atau tidak, dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Gambar 3.13 menunjukkan perkembangan persentase pekerja anak di Provinsi NTT pada tahun 2018-2020. Penduduk NTT usia 10-17 tahun yang menjadi pekerja yaitu sebesar 5,67 persen, naik 2,25 persen dibandingkan tahun 2019 dimana persentasenya sebesar 3,42 persen. Dengan kata lain, di Provinsi NTT pada tahun 2020, dari 100 anak usia 10-17 tahun ada sebanyak 5-6 anak yang bekerja.

Gambar 3.13
Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Provinsi NTT,
2018-2020



Sumber: Sakernas 2018-2020 - BPS

Bab 4



Kegiatan dan Praktek Baik Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



BAB IV

KEGIATAN DAN PRAKTEK BAIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dengan 6 (enam) sub bidang urusan yaitu kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak. Program, kegiatan atau praktek baik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi serta Kabupaten/kota dirangkum dalam Bab IV Profil Gender dan Anak.

A. Kegiatan pada DP3A Provinsi NTT

1. *Roadshow* PPRG

Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender terus dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan analisis gender terhadap seluruh kebijakan dan program/kegiatan. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan dimaksud dalam memperoleh akses, manfaat dari hasil pembangunan.

Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka menyusun program dan kegiatan yang responsif gender. Salah satu strategi yang digunakan untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diimplementasikan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan menggunakan *Gender Analisis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).

Sebagai dasar untuk mewujudkan kesetaraan gender, secara nasional telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang implementasinya diantaranya diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Di Provinsi NTT diterbitkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam peraturan tersebut, point penting yang patut dicermati secara bijak yaitu mempertimbangkan unsur kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan diseluruh bidang pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Instrument untuk mewujudkan kesetaraan dimaksud adalah penerapan PPRG dalam setiap program dan kegiatan pembangunan.

Sejauh ini implementasi PPRG di 39 Perangkat Daerah (PD) belum berjalan secara baik. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang penyusunan PPRG serta kurangnya komitmen daerah dalam melaksanakan PUG. Peran PPRG adalah untuk menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang akan membantu mempertajam analisis kesenjangan/memetakan kesenjangan yang terjadi

sekaligus membantu mempertajam kelompok sasaran berdasarkan data terpilah yang ada.

Dengan kata lain, secara substansial PPRG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, selanjutnya menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki secara memadai ataukah sebaliknya. PPRG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klarifikasi anggaran tetapi bagaimana proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender.

Berdasarkan data DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan tahun 2020 hanya 4 (empat) PD atau 0,10% Perangkat Daerah (PD) yang menyusun GAP dan GBS dari 39 PD. Melihat permasalahan diatas tentunya dibutuhkan penguatan untuk implementasi PPRG sehingga DP3A Prov. NTT mengambil langkah-langkah strategis untuk percepatan implementasi PUG di 39 PD melalui *Road Show* untuk mengintegrasikan GAP, GBS dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.

Tujuan *Road show* PPRG yaitu melembagakan PUG di 39 PD dan meningkatkan pemahaman ASN tentang mekanisme penyusunan anggaran yang responsif gender.

Road show dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan Pimpinan PD dan Sub Bagian Program Data dan Evaluasi (PDE) di masing-masing PD kemudian Tim DP3A Prov. NTT memberikan bimbingan penyusunan GAP dan GBS.

Gambar 4.1 *Road show* PPRG di Perangkat Daerah



2. Pemenuhan Hak Sipil Anak melalui Kepemilikan Akta Kelahiran

Setiap anak yang lahir adalah aset negara. Sejak lahir, mereka mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak). Hak-hak anak tersebut meliputi hak untuk bermain, berekspresi, memperoleh pendidikan yang baik, dan juga hak untuk mendapatkan nama dan identitas (akta kelahiran). Akta kelahiran penting untuk membantu anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka seperti mendapatkan bantuan pendidikan (beasiswa), KTP-el, pekerjaan, jaminan asuransi kesehatan, dan lain-lain.

Kepemilikan Akta kelahiran juga penting untuk melindungi anak-anak dari upaya eksploitasi atau *trafficking*. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yaitu mendata setiap bayi yang lahir dan mempermudah orang tua mendapatkan akta kelahiran melalui pembuatan akta kelahiran secara gratis. Program tersebut dilakukan karena pemerintah

berkomitmen agar setiap anak di Indonesia bisa mendapatkan hak kependudukannya sebagai warga Negara Indonesia sepenuhnya.

Advokasi Pemenuhan Hak Sipil Anak melalui Kepemilikan Akta kelahiran di Provinsi NTT dilakukan melalui sosialisasi, advokasi kepada Kepala Daerah, DP3A Kab/Kota, termasuk fasilitas kesehatan untuk menjamin anak baru lahir mendapatkan akta kelahiran saat lahir.

Gambar 4.2 Seorang anak yang baru lahir di salah satu rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran



3. Layanan Konsultasi dan Pengaduan *Online* Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada nomor 081138205000

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Kasus yang tercatat dan ditangani hanya sedikit dari keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat. Hal ini karena rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus yang dialami atau disaksikan

serta ketakutan korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Tidak jarang kasus yang dialami cenderung untuk diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sengaja ditutupi karena korban merasa malu atau kasus tersebut menjadi aib bagi keluarga. Padahal apabila tidak ditangani, pelaku kekerasan merasa tidak tersentuh oleh hukum dan bahkan mungkin akan mengulangi kembali tindakan kekerasan tersebut.

Layanan Konsultasi dan Pengaduan *Online* Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ini merupakan layanan yang bersifat preventif. Layanan penanganan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT yang telah ada selama ini tetap dilakukan. Apabila kasus yang dilaporkan lewat layanan ini tidak dapat diselesaikan dengan konsultasi maka akan dilakukan penanganan dan pendampingan lanjutan sesuai alur penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berlaku. Melalui layanan ini korban dapat melaporkan kasus kekerasan yang dialami kapan saja dan dimana saja.

Adapun mekanisme layanannya yaitu: 1). Pelapor menelpon ke nomor hotline **081138205000** 2). Operator menerima, mencatat, mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang dihadapi pelapor 3). Operator memberikan nomor identifikasi laporan sebagai pelapor untuk mengikuti perkembangan kasus 4). Operator menghubungi petugas layanan (tenaga ahli atau tokoh agama) dan menyampaikan pelaporan kasus 5). Operator menghubungkan pelapor dengan petugas layanan yang sesuai untuk menangani aduan pelapor 6). Petugas layanan

melakukan klarifikasi berupa identifikasi dan analisis untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada pelapor 7). Pemberian layanan berupa informasi, layanan konsultasi, penguatan atau doa dari petugas layanan 8). Jika kasus yang dilaporkan membutuhkan penanganan/pendampingan lebih lanjut dari psikolog, psikiater, medis atau bantuan hukum maka akan ditindak lanjuti dengan pelayanan langsung sesuai alur penanganan yang berlaku 9). Petugas wajib memberitahu pelapor berapa lama waktu untuk *follow up* pengaduan 10). Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut namun tidak terjangkau oleh pemberi layanan maka operator akan menghubungi unit layanan perlindungan perempuan dan anak terdekat dengan korban untuk mengambil alih.

Layanan konsultasi dan pengaduan ini memperhatikan prinsip-prinsip yaitu:

- a. Kemanusiaan artinya didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dari perempuan dan anak tanpa dipungut biaya
- b. Keadilan, artinya layanan yang diberikan untuk memberikan keadilan secara proporsional terhadap perempuan dan anak
- c. Rahasia yaitu merahasiakan identitas pelapor agar mereka merasakan aman dan nyaman dengan masalah yang telah dilaporkan kecuali apabila pelapor menghendaki sebaliknya.

Operator layanan dibagi dalam 2 (dua) jadwal piket yaitu pagi dan malam selama 30 hari dalam 1 (satu) bulan. Operator layanan ini berjumlah 24 orang.

Masyarakat Provinsi NTT diharapkan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dialami ke nomor layanan **081138205000**.

Gambar 4.3 Publikasi layanan *online* dan Operator sedang menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak



4. Pendampingan Calon Pengantin pada Kursus Pra Nikah, “Ketahanan Keluarga Untuk Percepatan Penurunan Stunting”.

Pendampingan bagi calon pasangan suami istri dalam persiapan membentuk keluarga baru pada saat Kursus Pra Nikah yang diadakan oleh lembaga agama, merupakan tindakan lanjut

terhadap *quick wins* Gubernur dalam penanganan stunting di NTT. Berdasarkan data RISKESDAS 2018, prevalensi stunting NTT tertinggi secara Nasional.

Anak stunting tentu berasal dari keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Anak merupakan investasi sumber daya manusia dalam pembangunan. Untuk itu sangat tepat jika penanganan stunting dilakukan melalui pendekatan berbasis keluarga, saat dimulainya persiapan pembentukan keluarga baru. Dengan kata lain pencegahan stunting dilakukan pada aspek hulu, saat calon pasangan suami istri akan membentuk keluarga baru. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan kewenangan provinsi dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan peningkatan kualitas keluarga, yaitu Peningkatan kualitas keluarga demi pemenuhan hak anak. Peningkatan kualitas keluarga dalam hal ini, melalui konsep ketahanan keluarga sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 06 tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga.

Hasil survey Rintisan Index Ketahanan Keluarga (R-IKK) oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016, NTT dikategorikan R-IKK Rendah. Komponen dengan nilai terendah adalah, komponen ketahanan fisik dalam hal Kecukupan pangan yaitu, Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga (ART) Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani Minimal 14 Kali Seminggu hanya 9,52%, sedangkan capaian nasional 28,84%. Provinsi NTT berada dalam kategori sangat rendah di posisi ke-2 setelah Papua. Komponen Ketahanan Ekonomi, dilihat dari persentase rumah tangga yang mempunyai pengeluaran perkapita per bulan di atas garis kemiskinan. Nilai Provinsi NTT 83,74% sedangkan Nasional 90,40%. Komponen kemitraan gender memiliki nilai rendah yaitu

persentase istri umur 15-49 tahun yang menyatakan keputusan penggunaan penghasilan suami dilakukan secara bersama oleh suami dan istri adalah 44,6%, sedangkan nilai nasional 46,3%. Kemitraan suami istri dalam mengurus rumah tangga, persentase rumah tangga yang kepala rumah tangga bersama pasangan mengurus rumah tangga 24,35% dan angka nasional 23,48%. Data BPS 2020, Index Perlindungan Anak (IPA), menyebutkan 12,24% balita NTT mendapatkan pengasuhan tidak layak di NTT, dan angka Nasional 3%.

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Berdasarkan data tersebut, yaitu ketahanan fisik, ketahanan ekonomi dan kemitraan gender menunjukkan bahwa ketahanan keluarga memiliki relasi yang sangat kuat dengan terjadinya stunting.

Suatu keluarga yang tidak memiliki ketahanan dalam hal ketahanan fisik, ketahanan ekonomi dan relasi kemitraan gender akan sangat rentan menjadi pemicu munculnya anak stunting dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu DP3A Provinsi NTT, melakukan intervensi melalui kolaborasi dengan lembaga agama untuk mempersiapkan calon keluarga baru agar memahami konsep ketahanan keluarga dan bagaimana pengaruhnya terhadap terjadinya anak stunting dalam keluarga. Dengan demikian calon keluarga baru mampu membentuk keluarga yang memiliki ketahanan yang optimal secara holistik, sehingga mampu mencegah adanya anak stunting dalam keluarga.

Sasaran dari kegiatan pendampingan calon pengantin ini adalah, pihak lembaga agama yang menyelenggarakan kursus pra nikah dan sasaran langsung adalah para peserta kursus pra nikah atau calon pasangan suami istri yang akan membentuk keluarga. Tahapan dilaksanakan kolaborasi dimulai dengan membuat nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan lembaga agama yaitu GMIT SINODE

Kupang, Keuskupan Agung Kupang, Majelis Ulama Indonesia NTT, GSJA Kupang, PHDI NTT di tahun 2020. Selanjutnya tahun 2021 disusun modul yang akan digunakan saat kursus pra nikah oleh para *expert* dibidangnya bersama Tim DP3A Prov. NTT. Modul Kursus Pra Nikah fokus pada peningkatan pemahaman ketahanan keluarga untuk pencegahan stunting melalui keterkaitan setiap komponen dalam ketahanan keluarga secara holistik dengan penguatan pemahaman relasi setara gender dalam keluarga untuk pemenuhan hak anak. Calon pasangan suami istri diharapkan memahami dan mampu mengimplementasikan pencegahan stunting dalam keluarga melalui relasi setara gender dalam keluarga dalam setiap komponen ketahanan keluarga. Harapannya akhirnya adalah hak anak terpenuhi melalui tumbuh kembang yang optimal dan tidak ada lagi anak stunting dalam keluarga di NTT.

Gambar 4.4 Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama

KESEPAKATAN BERSAMA
ARTIKHA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DEWASA
MAJELIS SINODE GMIT, KEUSKUPAN AGUNG KUPANG, BADAN PERHUKUM DAN HAK ASILAH BIDANG JEMBAT ALLAH NTT, PARHADA HINDU DHARMA PROVINSI NTT DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA NTT

T E R T A N G
PERCEKHAAN STUNTING BAGI CALON PASANGAN SUAMI ISTRI BERSAMA KETAHANAN KELUARGA YANG SETARA GENDER
NOMOR: 24/BER/002/09/01/2020
NOMOR: 037/001/1/P/Man/2020
NOMOR: 17/KAN/05.1/2020
NOMOR: 389/SP-P/002/03/2020
NOMOR: 24/PHDI/NTT/01/2020
NOMOR: 0018/08/09/01/2020

Pada hari ini, semesta tanggal bulan tahun dua ribu dan puluh bertepatan di Kupang, yang bertepatan dengan di tanggal ini:

- 1. VIKTOR BUNGTILU LAIBKODAT** Gubernur Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jalan Raja El Tuti Nomor 52 Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. 1. FALDIR MERY L. Y. HOLIMON** Ketua Majelis Sinode GMIT, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Lima Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Sinode GMIT.
- 2. VIKTOR BUNGTILU LAIBKODAT** Gubernur Kota Kupang
- 3. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA, NUSA TENGGARA TIMUR**
- 4. KETUA PARHADA HINDU DHARMA KUPANG**
- 5. KETUA BADAN PERHUKUM DAN HAK ASILAH BIDANG JEMBAT ALLAH NTT**

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 12 (dua belas), 6 (enam) di antaranya bermetrik cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah dilakukan penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I
PIHAK II

Gambar 4.5 Uji coba modul ketahanan keluarga untuk pencegahan stunting bagi Calon pengantin tahun 2021



5. Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting melalui Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi di Kota Kupang”

Aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sangat perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini merupakan wujud nyata Pentahelix. Kolaborasi dengan pihak perguruan tinggi diwujudkan melalui Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang “Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting”. Langkah yang dilakukan ini sangat tepat dan strategis karena saat ini Perguruan Tinggi diharapkan mampu menjawab Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM) sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat saat ini.

Provinsi NTT saat ini sedang bekerja keras dalam percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam program peningkatan kualitas keluarga dengan pendekatan ketahanan

keluarga melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Tahun 2021 telah dibuat PKS dengan 4 (empat) Perguruan Tinggi yaitu Universitas Nusa Cendana, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Muhammadiyah Kupang dan Universitas Katholik Widya Mandira.

Konsep kerjasama yang dibangun dimulai dari pendataan ketahanan keluarga dan kemitraan relasi setara gender bagi keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan atau keluarga beresiko stunting pada lokus stunting tinggi atau kemiskinan tinggi. Hasil pendataan tersebut akan dianalisis untuk dilakukan langkah intervensi selanjutnya oleh pihak Perguruan Tinggi dan DP3A Provinsi.

Tahapan kolaborasi dengan perguruan tinggi adalah sosialisasi ketahanan keluarga dan bentuk kerjasama, pembekalan teknis pengisian kuisioner dan perhitungan Index Ketahanan Keluarga (IKK) bagi dosen pembimbing lapangan, dan analisa hasil. Pada tahun 2021 telah dilakukan pula uji coba pengumpulan data ketahanan keluarga oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Selanjutnya akan dilaksanakan tahapan tersebut di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Rencana pada tahun 2022 akan dilakukan kegiatan pembekalan bagi para mahasiswa KKN sehingga pada saat kegiatan pengambilan data dapat berjalan optimal dan hasilnya dapat dianalisis untuk dilakukan model intervensi sesuai kebutuhan masyarakat.

Gambar 4.6 Sosialisasi dan pendampingan teknis “Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting” di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



B. PROGRAM/KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KAB/KOTA

1. Gereja Ramah Anak di Kota Kupang

Hal-hal yang mendasari kebijakan penerapan Gereja Ramah Anak (GRA) yaitu 1). gereja mempunyai peranan yang strategis sebagai wadah edukasi pengasuhan dalam keluarga terutama anak, 2). Gereja menjadi ruang diskusi aman dan nyaman bagi anak, sebagai tempat ruang kegiatan inovatif dan kreatif yang aman dan nyaman, 3). Gereja menjadi rumah aman memberikan perlindungan bagi anak, perempuan dan keluarga dari tindak kekerasan 4). Sebagai unsur dalam masyarakat, gereja memiliki kewajiban untuk turut serta dalam upaya perlindungan anak 5). Gereja menjadi mediator konflik internal keluarga 6). Gereja memantau pelaksanaan konvensi hak anak-pelayanan holistik yang membela kepentingan dan keberpihakan pada anak.

GRA diharapkan memberikan fungsi yaitu adanya kebijakan perlindungan anak di Gereja melalui Sinode, adanya anggaran yang memadai untuk bidang anak, adanya kelompok atau forum anak di gereja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, adanya sistem perlindungan anak yang berbasis gereja serta adanya sumber daya gereja untuk melindungi anak yang berhadapan dengan persoalan hukum. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang mendukung program pencegahan kekerasan terhadap anak dan mencegah anak menjadi korban kekerasan. Bimbingan teknis (bimtek) GRA dilaksanakan di 3 (tiga) Gereja yaitu Gereja Eden Kisbaki Manutapen, GMIT Batu Karang Kuanino, dan GMIT Kaisarea BTN Kolhua.

Peserta Bimtek adalah Pengurus Gereja. Melalui kegiatan ini peserta diharapkan memahami: 1). Pentingnya pemenuhan hak anak dilindungi gereja sesuai konvensi hak anak 2). Pentingnya Pengembangan Kota Kupang Menuju Kota Layak Anak melalui Gereja Ramah Anak 3). Memahami mekanisme dan tahapan pengembangan Gereja Ramah Anak. Dalam kegiatan tersebut telah disosialisasikan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak bagi pengurus gereja, strategi pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pengasuhan positif.

Gambar 4.7 Bimtek GRA di Kota Kupang



2. Pendataan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sikka

Keluarga merupakan bagian penting dalam program pembangunan. Banyak masalah tidak dapat di selesaikan dengan baik karena faktor keluarga tidak di

perhatikan. Masalah kesehatan, sosial ekonomi, penyalahgunaan narkoba, penyakit menular, pengembangan usaha ekonomi hanya dapat diselesaikan dengan baik jika faktor keluarga menjadi bagian dari penyelesaiannya.

Konsep pembangunan keluarga yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yaitu konsep Ketahanan Keluarga. Ketahanan keluarga adalah kondisi dimana keluarga mempunyai kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan, masalah dan tantangan sehingga keluarga dapat berjalan terus mencapai kesejahteraannya. Keluarga mampu untuk bertahan dan berjalan menuju kesejahteraan, dapat diukur, dapat diuraikan faktor-faktornya, sehingga dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki kemampuan keluarga mencapai kualitas dan kesejahteraannya.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pembangunan ketahanan keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Sikka melakukan pengembangan Model Pembangunan Ketahanan Keluarga yang mengambil Kecamatan Alok Timur sebagai sampel dengan sasaran pengumpulan data ketahanan keluarga di Kelurahan Wairotang dan Desa Koja Doi.

Data ketahanan keluarga sangat penting karena unit keluarga berada di masyarakat. Pengolahan data ketahanan keluarga di pemerintah desa/kelurahan dengan di dampingi oleh pemerintah daerah maka akan sangat membantu desa, untuk mengidentifikasi isu/permasalahan

ketahanan keluarga yang akan menjadi bagian dari perencanaan program/kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan dapat memberikan pedoman bagi aparat desa/ kelurahan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan pendataan ketahanan keluarga bertujuan menyamakan persepsi tentang konsep kebijakan ketahanan keluarga dan mengumpulkan data ketahanan keluarga menurut tipe keluarga. Data ketahanan keluarga yang diperoleh menjadi dasar untuk membuat perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan baik di tingkat desa maupun di perangkat daerah dalam rangka mendorong terwujudnya ketahanan keluarga.

Sumber daya yang terlibat dalam pendataan ketahanan keluarga:

- Fasilitator Ketahanan Keluarga yang telah mengikuti pelatihan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 2 (dua) orang
- Enumerator berjumlah 20 orang dengan kualifikasi minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Anggaran dari APBD Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar Rp. 20.246.700,-
- Sasaran pendataan ketahanan keluarga di Kelurahan Wairotang sebanyak 650 Kepala Keluarga (KK) untuk Wilayah Daratan dan Desa Koja Doi 460 KK untuk Wilayah Kepulauan.

Program Pendataan Ketahanan Keluarga dari DPPKBPPPA Kabupaten Sikka didukung Kementerian PPPA dalam bentuk memberikan akses berpartisipasi pada pelatihan Kader Pendataan Katahanan Keluarga di Mataram,

NTB. Selanjutnya pendataan ketahanan keluarga dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu :

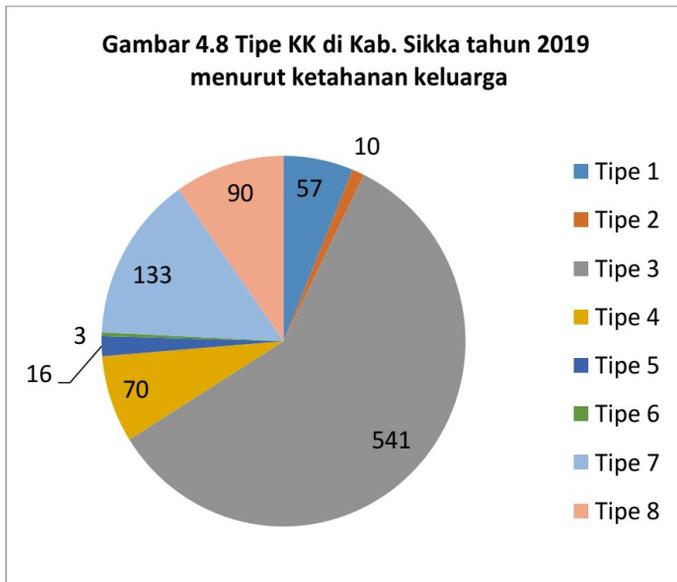
1. Sosialisasi dan advokasi Pendataan Ketahanan Keluarga pada perangkat daerah terkait, dan peningkatan kapasitas enumerator Kelurahan Wairotang pada tanggal 5-6 Desember 2019.
2. Peningkatan kapasitas enumerator Kelurahan Wairotang pada tanggal 5-6 Desember 2019 dan Desa Koja Doi pada tanggal 13-14 Desember 2019.
3. Pengumpulan data 7- 28 Desember 2019 yang disertai dengan uji petik pendataan.
4. Validasi dan Analisis Data Ketahanan Keluarga 19-20 Maret 2020 melibatkan enumerator, aparat pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
5. Pelaporan hasil Pendataan Ketahanan Keluarga pada Camat Alok Timur sebagai pemimpin wilayah.

Tipe keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Tipe Keluarga 1 : Terdiri dari suami dan istri yang memiliki anak dan lansia
2. Tipe Keluarga 2 : Terdiri dari suami dan istri yang memiliki lansia
3. Tipe Keluarga 3 : Terdiri dari suami dan istri yang memiliki anak
4. Tipe Keluarga 4 : Terdiri dari suami dan istri yang tidak memiliki anak dan lansia
5. Tipe Keluarga 5 : Terdiri dari suami atau istri yang memiliki anak dan lansia
6. Tipe Keluarga 6 : Terdiri dari suami atau istri yang memiliki lansia

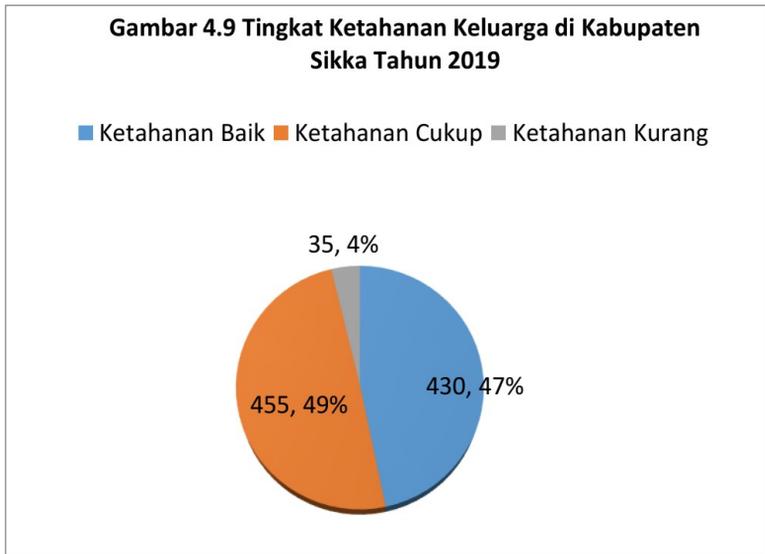
7. Tipe Keluarga 7 : Terdiri dari suami atau istri yang memiliki anak
8. Tipe Keluarga 8 : Terdiri dari suami atau istri yang tidak memiliki anak dan lansia

Hasil Pendataan Ketahanan Keluarga Jumlah KK yang berhasil di data adalah 920 KK dari target 1.110 Kepala Keluarga atau sebesar 82,88%, dengan perincian Kelurahan Wairotang KK yang terdata 507 dari 650 KK (78%). Desa Koja Doi KK yang terdata 413 KK dari 460 KK (89,78%) Dari Hasil Pendataan diketahui bahwa tipe keluarga terbanyak adalah Tipe Keluarga 3 (tiga) sebanyak 541 KK dari 920 KK (58,80%), yang paling sedikit adalah tipe keluarga 6 (enam) dengan jumlah 3 (tiga) KK dari 920 KK (0,32%).



Sumber Data: Pendataan Ketahanan Keluarga kab. Sikka 2019

Berdasarkan Pendataan diketahui bahwa Keluarga dengan Ketahanan Baik sebanyak 430 KK (47%), Ketahanan Cukup sebanyak 455 KK (49%) dan Ketahanan Kurang Sebanyak 35 KK (4%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2. berikut:



Sumber Data: Pendataan Ketahanan Keluarga 2019

Data diatas menunjukkan bahwa status ketahanan keluarga di Kabupaten Sikka masih perlu ditingkatkan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pendataan ketahanan keluarga di Kab. Sikka yaitu:

1. Terbatasnya kapasitas enumerator, dimana standar pendidikan minimal yang ditetapkan adalah pendidikan minimla SMP sedangkan enumerator yang melaksanakan pendataan sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (SD)

2. Kecamatan yang menjadi sampel minimal 2 (dua) kecamatan, namun mengingat keterbatasan anggaran maka pendataan hanya mengambil sampel 1 (satu) kecamatan yaitu Alok Timur.
3. Belum bisa mengukur ketahanan keluarga menurut 6 (enam) Dimensi yaitu Legalitas, Kemitraan Gender, Ketahanan Fisik, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial Psikologi dan Ketahanan Sosial Budaya, disebabkan formulasi pengukurannya mengharuskan konsultasi langsung kepada Penggagas Ketahanan Keluarga di IPB Bogor. Konsultasi terkendala pandemi covid-19.
4. Rencana Pendataan Ketahanan Keluarga Tahun 2021 tidak dapat dilanjutkan disebabkan pandemi covid-19, penerapan protocol kesehatan dan adanya refocusing anggaran oleh pemerintah daerah.

Gambar 4.10 Pendataan Ketahanan Keluarga di Kab. Sikka



3. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) bersama tenaga professional Psikolog di Kabupaten Sumba Barat

Puspaga yang diimplementasikan di Kabupaten Sumba Barat yaitu layanan pencegahan kekerasan dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang dikelola oleh tenaga profesional (psikolog). Inisiasi pembentukan Puspaga bermula ketika Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Sumba Barat melaksanakan kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera. Dalam sesi diskusi kegiatan penyuluhan tersebut, diperoleh berbagai informasi dari peserta bahwa terdapat banyak permasalahan yang dihadapi para perempuan dalam menjalankan rumah tangga. Diantaranya persoalan komunikasi dengan pasangan, masalah pengasuhan anak, pendidikan anak dan lain sebagainya menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagai akibat dari tidak adanya pemahaman yang baik tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Untuk membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan tersebut, kegiatan berupa sosialisasi/ penyuluhan saja belum dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu strategi yang lebih tepat yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, maka dibentuk Puspaga Sumba Barat.

Puspaga Sumba Barat dibentuk pada Januari 2020. Tujuan pembentukan Puspaga yaitu sebagai salah satu upaya memberikan informasi pengasuhan, kesetaraan gender dan layanan konseling jika diperlukan masyarakat. Jika dalam konseling ditemukan bahwa permasalahan yang dikonsultasikan adalah kasus yang sudah melebihi tugas Puspaga maka Puspaga akan berkoordinasi dengan instansi terkait misalnya kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan lain-lain.

Tahapan serta alur konseling Puspaga adalah klien datang ke kantor atau menelpon dan membuat janji dengan psikolog. Konseling dilakukan setelah ditentukan waktu dan tempat yang disepakati bersama.

Di Tahun 2020, layanan konseling dilakukan di salah satu ruangan khusus pada Kantor DPPPA Sumba Barat. Banyak masyarakat yang sudah menghubungi kontak Puspaga untuk melakukan konseling, namun tidak semuanya bersedia datang ke Puspaga untuk berkonseling. Berdasarkan hal tersebut, di tahun 2021 layanan Puspaga tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain dengan tetap menjaga privasi dan kenyamanan bagi klien dan psikolog. Kebijakan ini juga merupakan strategi “menjemput bola”, untuk semakin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa di Sumba Barat ada layanan Puspaga untuk membantu masyarakat dan bersifat **gratis**.

Hal-hal yang dikonselingkan terkait pendidikan anak, komunikasi dengan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, pemerkosaan, bagaimana mendampingi anak, mendampingi orang yang stres dan depresi, anak yang kecanduan *game online*, permasalahan keluarga, mendampingi orang sakit, mendampingi lansia, menghadapi masa pensiun, relasi dengan pasangan, relasi dengan atasan dan rekan kerja, dll.

Kehadiran Puspaga di kabupaten Sumba Barat diharapkan menjadi salah satu wadah bagi masyarakat terutama bagi orang tua dan calon orang tua untuk semakin memahami pola asuh dan tumbuh kembang anak dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu diharapkan bahwa dengan adanya Puspaga menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat mensharingkan pengalaman dan permasalahan yang

dialami, kepada orang yang tepat/tenaga profesional yaitu Psikolog dan untuk menemukan solusi yang terbaik.

Privasinya klien tejamin karena banyak klien yang hanya ingin didengarkan karena takut kalau menceritakan kepada orang yang tidak tepat maka akan menjadi 'gosip'. Program ini menemukan bahwa Puspaga menjadi wadah sharing persoalan, wadah pengelolaan persoalan sehingga tidak menjadi stress dan berkelanjutan. Setelah mendapatkan konseling di Puspaga, mayarakat yang datang berkonseling merasa senang dan berterimakasih karena dengan konseling mereka merasa sangat terbantu dan belajar mengelola emosi dengan baik.

Testimoni masyarakat pengguna layanan PUSPAGA :

'NA' (inisial nama) merasa bahwa selama ini semua masalah yang dihadapi hanya disimpan sendiri karena bila diceritakan kepada teman atau keluarga hal itu menjadi gosip. Dengan adanya puspaga, "NA" dapat menceritakan permasalahan yang hadapinya dan privasinya tetap terjaga.

Bunga (samaran) merasa bersyukur karena dengan adanya puspaga Bunga dapat menceritakan pengalamannya yang akan bercerai dengan suaminya dan setelah konseling Bunga dapat bertemu dengan suaminya dan bisa rujuk kembali.

Layanan puspaga yang dikelola oleh tenaga profesional ini sebagai strategi pemerintah unuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana mengedukasi masyarakat dalam pengasuhan. Puspaga menjadi wadah yang tepat untuk berbagi pengalaman yang dihadapi dengan jaminan privasi dan rahasianya terjaga dan menemukan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. **"Ayo ke puspaga agar hidup lebih berkualitas".**

Gambar 4.11 Kegiatan Puspaga di Kabupaten Sumba Barat



4. Lopo Cerdas, Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka dan Yayasan Karunia Pengembangan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Malaka dan Yayasan Karunia Pengembangan Anak (YKPA) menyelenggarakan Pendidikan berbasis Masyarakat yang dikenal dengan Lopo Cerdas.

Kelompok Lopo Cerdas ini dikembangkan di 6 (enam) desa dengan jumlah kelompok sebanyak 8 (delapan) Lopo Cerdas yakni di Desa Wehali 1 (satu) kelompok, Desa Kamanasa 2 (dua) kelompok, Desa Lakekun 2 (dua) kelompok, Desa Lakekun Utara 2 (dua) kelompok dan Desa Litamali 1 (satu) kelompok.

Lopo Cerdas merupakan wadah yang dibentuk di masyarakat untuk anak-anak berkumpul, bermain dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dalam mendukung pendidikan dan pengembangan, kecakapan hidup dan literasi keuangan serta pengembangan ketrampilan membaca, menulis, berhitung (Calistung) serta pengembangan minat bakat anak-anak.

Pembentukan Lopo Cerdas berdasarkan temuan bahwa anak-anak belum bisa membaca dan berhitung dengan benar dan lancar (hasil diskusi dengan kepala sekolah serta hasil survey tahun 2015 dengan *tools Asser*, anak tidak memiliki ketrampilan diri sehingga ketika mendapatkan masalah tidak mampu untuk menyelesaikan dengan baik selain itu juga setelah kegiatan pembelajaran utama di sekolah selesai, anak-anak bermain bebas tanpa kontrol orang tua.

Lopo Cerdas ini sudah dibentuk dan melakukan kegiatan di kabupaten Malaka sejak tahun 2016 hingga sekarang dan kegiatan ini sudah cukup dikenal oleh anak-anak dan masyarakat di desa-desa dimana kegiatan ini dilakukan. Kegiatan lopo cerdas ini difasilitasi oleh para fasilitator terlatih yang telah dibekali dengan berbagai pelatihan. Fokus kegiatan Lopo Cerdas yaitu pada literasi membaca, menulis, berhitung serta

mengembangkan pendidikan kecakapan hidup yang terpusat pada 5 (lima) elemen yaitu eksplorasi diri, pengenalan diri dan bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi, memahami hak dan tanggung jawab, menabung, membelanjakan, perencanaan dan anggaran serta usaha sosial dan finansial. Kegiatannya dilakukan seminggu 2-3 kali pertemuan dan semua kegiatan ini terkontrol, dimonitor, dan dievaluasi serta membuat laporan pertanggungjawabannya setiap bulan.

Strategi implementasi Program Lopo Cerdas yaitu Sosialisasi Proyek Pendidikan Kecakapan Hidup Literasi Keuangan (PKHLK) kepada orang tua, pihak sekolah dan pemerintah desa yaitu:

- Peningkatan kapasitas Fasilitator Lopo Cerdas secara regular melalui Pelatihan-pelatihan, Bedah modul PKHLK dan diskusi regular PKHLK
- Silang Fasilitator dan juga menggunakan metode 'keroyok' dimana beberapa fasilitator yang berdekatan melakukan *rolling* kegiatan di Lopo-Lopo Cerdas yang berdekatan untuk memudahkan pendampingan pada anak-anak
- Pengelompokkan usia anak sesuai kebutuhan dan kemampuan (Kelas Calistung dan PKHLK)
- Pertemuan rutin anak-anak di Lopo Cerdas. Kegiatan dilakukan 2 (dua) kali seminggu di mana 1 (satu) kali pertemuan untuk teori dan 1 (satu) kali pertemuan khusus untuk praktek yang dilakukan baik di dalam maupun di luar ruangan.
- Kegiatan sosial berupa kunjungan ke panti asuhan, membersihkan lingkungan gereja dan tempat-tempat umum serta pelayanan publik, menanam pohon dan lainnya.

- Ruang ekspresi anak melalui Gebyar Cerdas tingkat mitra dan propinsi.
- Berjejaring dengan pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan sekolah
- Monitoring, mentoring dan evaluasi implementasi proyek secara regular baik secara langsung maupun melalui *whatsapp* group.
- Sistem pelaporan, Laporan Kegiatan Lopo Cerdas juga diberikan ke Desa dan setiap laporan Lopo Cerdas wajib dibubuhi tandatangan Kepala Desa
- Advokasi dana desa

Gambar 4.12 Kegiatan Lopo Cerdas



Selama masa pandemi covid-19, anak-anak bersama fasilitator membuat masker, kartu ucapan dukungan dan terima kasih kepada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan di Betun,

Puskesmas Namfalus, Aparat Kepolisian yang bertugas di posko covid-19, petugas Camat dan Pemerintah Desa. Selain itu anak-anak juga menanam sayur di pekarangan rumah mereka.

5. Sosialisasi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penyuluhan melindungi anak dari kekerasan seksual bagi masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan, dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dampak dan penanganan kasus KDRT termasuk sanksi hukum maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Sabu Raijua melaksanakan sosialisasi secara luas bagi masyarakat di Desa dan kelurahan yaitu dari Kelurahan Ledebu 49 orang, Kelurahan Ledeke 27 orang, Desa Bolua 24 orang, Desa Ballu 28 orang, Desa Kolorae 22 orang. Kegiatan ini melibatkan peserta dari Dinas Sosial dan polres Sabu Raijua dan Polres Sabu.

Gambar 4.13 Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan KDRT



Disamping sosialisasi KDRT, Dinas Sosial P3A Kabupaten Sabu Raijua juga melaksanakan Penyuluhan tentang Melindungi Anak dari kekerasan seksual. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti, bentuk-bentuk tanda-tanda kekerasan seksual terhadap anak, dampak kekerasan seksual terhadap anak serta peranan orang tua dalam mendampingi anak yang mengalami kekerasan seksual. Masyarakat juga diharapkan memiliki pemahaman bagaimana mencegah dan melindungi anak dari kekerasan seksual. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat dan Sabu Timur.

Sosialisasi, penyuluhan harus terus dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk melaporkan kasus KDRT dan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Gambar 4.14 Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan KDRT dan kekerasan seksual



6. Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi PUG/ kesetaraan gender di Kabupaten Alor

Ditahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor melaksanakan Advokasi sosialisasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait isu gender serta menjembatani adanya persepsi yang berbeda tentang gender dimasyarakat.

Perempuan dan anak korban kekerasan juga perlu mendapatkan informasi dan edukasi agar mereka memahami menyangkut fungsi, peran serta hak dan kewajiban perempuan dan anak. Sosialisasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan di Kecamatan Pantar dan Pantar Timur, sedangkan advokasi pengarusutamaan gender (PUG) di berikan kepada Tim Pembina PKK kecamatan dan desa serta tokoh perempuan dan anak di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Barat.

Gambar 4.15 Kegiatan Sosialisasi dan advokasi PUG di Kab. Alor



Tahun 2021 dilaksanakan komunikasi informasi dan edukasi gender termasuk Advokasi kebijakan pendampingan PUG bagi stakeholder khususnya perempuan dari Kecamatan Teluk

Mutiara, Alor Barat Daya, Alor Timur Laut, Tim PKK kecamatan, tim PKK desa dan tokoh agama.

7. Pembentukan Forum Anak Kabupaten di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melalui program Pemenuhan Hak Anak melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan anak. Tujuannya menumbuhkan kesadaran dan peran aktif anak, partisipasi dan memberikan kesempatan untuk anak mengekspresikan pendapat serta memilih Duta Anak daerah yang selanjutnya akan mengikuti pemilihan Duta Anak Provinsi. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak yaitu Konferensi Anak Daerah Provinsi NTT, Talk show, peringatan Hari Anak Nasional, Pengukuhan Dewan Anak TTS, Jambore Anak, dan berbagai lomba. Beberapa kegiatan Forum Anak merupakan kegiatan reguler.

Gambar 4.16 Kegiatan Forum Anak Kabupaten TTS





Daftar dan menterjemah Pendidikan

1. Bersekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (diikuti dengan surat izin belajar/Kartu Keluarga)
2. Berusia anak: 13-16 tahun
3. Sehat Fisik dan Mental (diikuti dengan surat keterangan sehat)
4. Memiliki pengalaman berorganisasi (Dinasional), aktif dan berprestasi serta pemerintahan (baik Anak di luar TTS)
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
6. Tidak terhalang bahasa dan mampu berinteraksi dengan bahasa Inggris
7. Tidak memiliki kebiasaan dan mampu berinteraksi dengan bahasa Inggris
8. Tidak memiliki riwayat penyakit menular
 - 8.1. HIV/AIDS
 - 8.2. TBC
 - 8.3. Hepatitis
 - 8.4. Malaria
 - 8.5. Demam Berdarah Dengue
 - 8.6. Penyakit Kulit
 - 8.7. Penyakit Mata
 - 8.8. Penyakit Telinga
 - 8.9. Penyakit Tenggorokan
 - 8.10. Penyakit Jantung
 - 8.11. Penyakit Ginjal
 - 8.12. Penyakit Usus
 - 8.13. Penyakit Hati
 - 8.14. Penyakit Salivasi
 - 8.15. Penyakit Sistem Peredaran Darah
 - 8.16. Penyakit Sistem Reproduksi
 - 8.17. Penyakit Sistem Saraf
 - 8.18. Penyakit Sistem Muskuloskeletal
 - 8.19. Penyakit Sistem Endokrin
 - 8.20. Penyakit Sistem Imun
 - 8.21. Penyakit Sistem Integritas Kulit
 - 8.22. Penyakit Sistem Integritas Mata
 - 8.23. Penyakit Sistem Integritas Telinga
 - 8.24. Penyakit Sistem Integritas Tenggorokan
 - 8.25. Penyakit Sistem Integritas Jantung
 - 8.26. Penyakit Sistem Integritas Ginjal
 - 8.27. Penyakit Sistem Integritas Usus
 - 8.28. Penyakit Sistem Integritas Hati
 - 8.29. Penyakit Sistem Integritas Salivasi
 - 8.30. Penyakit Sistem Integritas Sistem Peredaran Darah
 - 8.31. Penyakit Sistem Integritas Sistem Reproduksi
 - 8.32. Penyakit Sistem Integritas Sistem Saraf
 - 8.33. Penyakit Sistem Integritas Sistem Muskuloskeletal
 - 8.34. Penyakit Sistem Integritas Sistem Endokrin
 - 8.35. Penyakit Sistem Integritas Sistem Imun
 - 8.36. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Kulit
 - 8.37. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Mata
 - 8.38. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Telinga
 - 8.39. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Tenggorokan
 - 8.40. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Jantung
 - 8.41. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Ginjal
 - 8.42. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Usus
 - 8.43. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Hati
 - 8.44. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Salivasi
 - 8.45. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Sistem Peredaran Darah
 - 8.46. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Sistem Reproduksi
 - 8.47. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Sistem Saraf
 - 8.48. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Sistem Muskuloskeletal
 - 8.49. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Sistem Endokrin
 - 8.50. Penyakit Sistem Integritas Sistem Integritas Sistem Imun
9. Wajib mengikuti Instagram Dewasa Anak TTS (@dewasaanak.tts) dan Facebook Dewasa Anak TTS (dewasaanak.tts) dan aktif mengikuti ke email Dewasa Anak TTS (dewasaanak.tts@gmail.com) dan aktif mengikuti ke email Dewasa Anak TTS (dewasaanak.tts@gmail.com)
10. Menjalankan sendiri bisnis atau sedang sampai Pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan Anak (maksudnya di internet)
11. Mampu mempresentasikan terkait essay yang telah dibuat
12. Dapat dikuratori pengumuman diterima ke email Dewasa Anak TTS (dewasaanak.tts@gmail.com)



LAMPIRAN



Lampiran Bab 2. Profil Perempuan

Tabel 2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Timur Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota, 2018-2020

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)			Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sumba Barat	66,58	66,98	67,08	12,88	12,89	13,11	6,52	6,53	6,60
Sumba Timur	64,45	64,94	65,13	12,80	12,81	12,82	6,74	6,86	7,12
Kupang	63,86	64,39	64,63	13,83	13,84	13,85	7,11	7,37	7,38
Timor Tengah Selatan	65,91	66,32	66,42	12,55	12,56	12,57	6,47	6,72	6,73
Timor Tengah Utara	66,45	66,86	66,96	13,29	13,30	13,31	7,26	7,51	7,81
Belu	63,81	64,35	64,61	12,25	12,26	12,27	7,08	7,11	7,35
Alor	60,80	61,29	61,48	12,09	12,11	12,23	7,81	8,09	8,41
Lembata	66,57	66,97	67,07	12,26	12,40	12,42	7,95	8,21	8,22
Flores Timur	64,70	65,10	65,20	12,89	12,90	12,91	7,42	7,70	7,71
Sikka	66,61	67,07	67,24	12,70	12,87	13,16	6,69	6,71	6,94
Ende	64,75	65,17	65,29	13,76	13,77	13,78	7,79	7,80	7,81
Ngada	67,59	67,96	68,04	12,68	12,69	12,70	8,07	8,37	8,52
Manggarai	66,23	66,77	67,03	12,71	13,14	13,41	7,26	7,27	7,37
Rote Ndao	63,80	64,34	64,60	13,16	13,17	13,18	7,24	7,29	7,59
Manggarai Barat	66,58	67,12	67,38	11,55	11,96	12,28	7,18	7,19	7,30
Sumba Tengah	67,96	68,32	68,38	12,32	12,66	12,96	5,76	5,96	6,25
Sumba Barat Daya	68,02	68,43	68,53	13,04	13,05	13,06	6,32	6,33	6,34
Nagekeo	66,62	67,03	67,13	12,46	12,47	12,48	7,82	7,83	7,89
Manggarai Timur	67,62	67,98	68,04	11,34	11,69	11,99	6,65	6,87	7,08
Sabu Raijua	59,53	60,23	60,64	13,12	13,13	13,14	6,06	6,33	6,65
Malaka	64,52	64,89	64,97	12,76	12,77	12,78	6,60	6,86	6,87
Kota Kupang	68,90	69,37	69,55	16,08	16,24	16,40	11,46	11,47	11,58
NTT	66,38	66,85	67,01	13,10	13,15	13,18	7,30	7,55	7,63

Sumber: BPS

Tabel 2.1. (Lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)			Indeks Pembangunan Manusia		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sumba Barat	7.275	7.586	7.321	62,91	63,56	63,53
Sumba Timur	9.351	9.640	9.406	64,65	65,34	65,52
Kupang	7.472	7.698	7.526	63,55	64,43	64,32
Timor Tengah Selatan	6.855	6.955	6.861	61,58	62,23	62,15
Timor Tengah Utara	6.357	6.479	6.364	62,65	63,34	63,53
Belu	7.403	7.677	7.479	61,86	62,54	62,68
Alor	6.750	6.958	6.786	60,14	61,03	61,33
Lembata	7.253	7.474	7.305	63,96	64,91	64,74
Flores Timur	7.573	7.770	7.631	63,55	64,34	64,22
Sikka	7.958	8.313	8.081	63,89	64,75	65,11
Ende	8.995	9.315	9.094	66,62	67,20	67,04
Ngada	8.857	8.961	8.865	67,10	67,76	67,88
Manggarai	7.175	7.276	7.203	63,32	64,15	64,54
Rote Ndao	6.484	6.720	6.539	61,51	62,22	62,39
Manggarai Barat	7.426	7.602	7.468	62,58	63,50	63,89
Sumba Tengah	6.093	6.198	6.108	60,07	61,01	61,53
Sumba Barat Daya	6.298	6.594	6.372	61,89	62,60	62,28
Nagekeo	8.219	8.469	8.309	65,35	65,88	65,81
Manggarai Timur	5.809	5.919	5.818	59,49	60,47	60,85
Sabu Raijua	5.245	5.354	5.265	55,79	56,66	57,02
Malaka	5.894	5.998	5.901	59,66	60,34	60,21
Kota Kupang	13.199	13.592	13.337	78,84	79,55	79,71
NTT	7.566	7.769	7.598	64,39	65,23	65,19

Sumber: BPS

Tabel 2.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nusa Tenggara Timur
Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota, 2018-2020

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)			Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)(Tahun)		
	Perempuan			Perempuan			Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sumba Barat	68,47	68,88	68,98	12,74	12,87	13,12	6,22	6,23	6,33
Sumba Timur	66,30	66,80	66,98	12,86	12,87	12,88	6,67	6,94	7,10
Kupang	65,71	66,25	66,47	13,87	13,88	13,89	7,05	7,22	7,23
Timor Tengah Selatan	67,79	68,20	68,30	14,74	14,75	14,76	6,02	6,33	6,34
Timor Tengah Utara	68,34	68,76	68,86	13,95	13,96	13,97	6,99	7,27	7,60
Belu	65,65	66,21	66,45	12,59	12,60	12,61	6,78	6,79	7,07
Alor	62,58	63,08	63,26	12,27	12,29	12,30	7,40	7,68	8,00
Lembata	68,47	68,87	68,96	12,73	12,74	12,75	7,31	7,56	7,57
Flores Timur	66,55	66,96	67,06	12,72	12,73	12,74	6,82	7,04	7,05
Sikka	68,50	68,98	69,14	13,11	13,44	13,45	6,50	6,51	6,59
Ende	66,62	67,03	67,13	13,63	13,76	13,77	7,37	7,38	7,53
Ngada	69,50	69,89	69,96	12,96	12,97	12,98	7,93	8,24	8,44
Manggarai	68,12	68,67	68,91	12,69	13,14	13,41	7,00	7,01	7,02
Rote Ndao	65,65	66,20	66,43	12,85	12,86	12,87	7,05	7,06	7,43
Manggarai Barat	68,48	69,03	69,29	11,52	11,67	11,74	6,76	6,77	6,78
Sumba Tengah	69,91	70,26	70,30	12,77	13,21	13,22	5,68	5,88	6,23
Sumba Barat Daya	69,95	70,35	70,43	13,21	13,23	13,24	5,99	6,00	6,09
Nagekeo	68,50	68,93	69,03	12,44	12,45	12,46	7,82	7,83	7,88
Manggarai Timur	69,53	69,90	69,96	11,73	12,01	12,30	6,39	6,65	6,66
Sabu Raijua	61,28	61,99	62,41	13,33	13,34	13,35	6,22	6,51	6,84
Malaka	66,33	66,75	66,82	12,93	12,94	12,95	6,21	6,47	6,48
Kota Kupang	70,83	71,29	71,43	16,05	16,24	16,45	11,06	11,07	11,25
NTT	68,28	68,81	68,96	13,20	13,28	13,38	7,00	7,23	7,28

Sumber: BPS

Tabel 2.2. (Lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)			Indeks Pembangunan Manusia			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	Perempuan			Perempuan					
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sumba Barat	7.132	7.425	7.128	61,92	62,67	62,66	94,13	94,47	94,61
Sumba Timur	9.224	9.480	9.260	64,17	65,02	65,09	96,03	96,43	96,16
Kupang	5.529	5.665	5.561	59,86	60,59	60,49	88,29	88,22	88,23
Timor Tengah Selatan	5.987	6.083	6.008	61,40	62,13	62,05	94,23	94,87	94,91
Timor Tengah Utara	5.873	5.977	5.865	61,78	62,49	62,68	95,44	95,52	95,55
Belu	7.256	7.535	7.333	61,32	62,00	62,17	96,81	96,88	97,10
Alor	6.424	6.600	6.430	58,97	59,83	60,01	92,34	92,37	92,14
Lembata	6.732	6.912	6.768	62,59	63,36	63,19	91,44	91,27	91,29
Flores Timur	7.143	7.329	7.200	61,76	62,49	62,37	91,28	91,29	91,32
Sikka	6.131	6.369	6.279	60,99	61,96	61,97	88,96	89,64	89,15
Ende	8.650	8.958	8.738	65,30	65,99	65,97	95,23	95,44	95,64
Ngada	8.635	8.747	8.624	66,67	67,37	67,50	95,76	95,91	96,09
Manggarai	5.510	5.596	5.533	59,77	60,62	60,86	87,70	88,16	88,00
Rote Ndao	4.435	4.586	4.456	56,25	56,93	57,06	84,59	84,64	84,62
Manggarai Barat	5.974	6.116	6.011	59,42	60,08	60,09	87,43	87,17	86,67
Sumba Tengah	5.019	5.075	4.995	57,96	58,90	59,14	90,78	91,28	90,90
Sumba Barat Daya	6.107	6.392	6.170	61,07	61,79	61,54	97,43	97,48	97,62
Nagekeo	8.422	8.615	8.444	65,30	65,75	65,66	99,15	99,04	98,97
Manggarai Timur	5.062	5.158	5.064	57,72	58,68	58,78	90,80	90,89	90,50
Sabu Raijua	4.675	4.772	4.698	54,47	55,36	55,72	92,54	92,76	92,79
Malaka	4.873	4.968	4.902	56,87	57,58	57,47	89,17	89,42	89,49
Kota Kupang	12.912	13.215	12.914	77,86	78,52	78,74	95,50	95,48	95,73
NTT	7.171	7.362	7.192	63,28	64,16	64,13	92,57	92,72	92,73

Sumber: BPS

Tabel 2.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nusa Tenggara Timur
Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota, 2020

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)			Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumba Barat	16,00	16,00	16,00	45,02	46,82	50,07
Sumba Timur	6,67	10,00	10,00	49,91	49,81	44,14
Kupang	14,29	12,50	10,26	39,80	45,78	49,50
Timor Tengah Selatan	12,50	10,00	10,00	46,56	53,92	53,62
Timor Tengah Utara	6,67	0,01	0,00	47,52	55,41	52,48
Belu	36,67	23,33	23,33	56,51	50,16	46,37
Alor	6,67	6,67	6,67	49,78	53,79	50,68
Lembata	0,00	0,01	0,00	45,69	51,26	47,45
Flores Timur	0,00	3,33	3,33	55,18	45,76	51,09
Sikka	8,57	14,29	14,29	51,65	58,84	64,10
Ende	3,33	10,00	10,00	55,99	56,77	54,47
Ngada	16,00	4,00	4,00	53,07	57,56	59,03
Manggarai	11,43	11,43	11,43	41,89	40,23	43,20
Rote Ndao	4,00	0,01	0,00	32,85	41,54	38,10
Manggarai Barat	3,33	3,33	6,67	50,64	38,54	41,02
Sumba Tengah	0,00	0,01	0,00	56,13	55,78	48,29
Sumba Barat Daya	0,00	11,43	11,43	51,37	34,07	34,63
Nagekeo	0,00	0,01	0,00	47,35	58,66	59,82
Manggarai Timur	3,33	3,33	3,33	39,52	43,62	49,26
Sabu Raijua	5,00	10,00	10,00	56,11	53,61	52,30
Malaka	20,00	12,00	12,00	34,21	52,05	56,65
Kota Kupang	12,50	20,00	20,00	51,30	42,77	48,87
NTT	10,77	18,46	20,00	48,51	48,41	50,13

Sumber: BPS

Tabel 2.3. (Lanjutan)

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sumba Barat	35,08	35,38	35,35	68,55	69,24	69,00
Sumba Timur	42,13	42,27	42,21	60,86	64,91	64,29
Kupang	35,41	35,43	35,83	65,58	65,30	63,16
Timor Tengah Selatan	29,23	29,59	29,70	59,68	57,47	57,66
Timor Tengah Utara	40,04	40,05	40,19	59,86	51,59	51,76
Belu	38,38	38,40	38,25	81,28	75,18	74,45
Alor	43,26	43,47	43,64	60,49	60,64	60,55
Lembata	45,34	45,57	45,76	52,34	53,04	52,64
Flores Timur	43,67	43,71	44,05	53,37	57,61	57,92
Sikka	36,68	37,06	37,21	58,57	64,03	62,53
Ende	52,39	52,44	52,39	57,99	65,66	65,67
Ngada	46,72	46,80	46,91	72,21	59,22	58,82
Manggarai	46,67	46,81	46,71	65,85	65,61	66,32
Rote Ndao	35,05	35,12	35,25	50,47	48,49	47,40
Manggarai Barat	38,96	38,99	38,80	54,66	53,14	57,54
Sumba Tengah	41,48	41,53	41,40	52,83	53,09	53,41
Sumba Barat Daya	47,75	47,78	47,60	54,31	65,43	65,34
Nagekeo	49,28	49,32	49,25	53,11	52,75	52,29
Manggarai Timur	34,89	35,25	35,22	50,19	51,62	51,91
Sabu Raijua	35,92	36,39	36,43	49,53	56,04	55,93
Malaka	48,51	48,56	48,87	62,42	59,01	58,53
Kota Kupang	38,86	38,93	39,15	68,62	75,14	75,61
NTT	43,26	43,33	43,56	65,86	73,37	74,53

Sumber: BPS

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu di Provinsi NTT, 2020

Wilayah	Bekerja (persen)	Pengangguran Terbuka (persen)	Sekolah (persen)	Mengurus Rumah Tangga (persen)	Lainnya (persen)	Jumlah (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumba Barat	60,00	1,75	11,03	24,04	3,18	100,00
Sumba Timur	60,27	2,19	9,63	24,05	3,85	100,00
Kupang	57,33	2,68	9,32	27,00	3,66	100,00
Timor Tengah Selatan	61,21	1,46	6,87	27,00	3,45	100,00
Timor Tengah Utara	67,79	3,06	7,61	19,15	2,40	100,00
Belu	53,64	4,15	10,66	28,82	2,73	100,00
Alor	68,89	1,28	6,42	19,47	3,94	100,00
Lembata	57,91	2,50	5,10	26,94	7,55	100,00
Flores Timur	61,44	1,58	7,19	25,31	4,49	100,00
Sikka	61,38	2,14	7,45	26,05	2,98	100,00
Ende	63,44	2,05	7,73	24,41	2,37	100,00
Ngada	59,97	2,89	7,57	24,93	4,63	100,00
Manggarai	68,02	1,21	8,78	18,71	3,28	100,00
Rote Ndao	58,97	3,02	7,77	27,30	2,94	100,00
Manggarai Barat	67,95	3,40	7,96	17,79	2,90	100,00
Sumba Tengah	50,76	2,64	7,64	34,88	4,08	100,00
Sumba Barat Daya	69,20	0,97	10,10	17,20	2,54	100,00
Nagekeo	57,20	1,71	7,55	28,91	4,64	100,00
Manggarai Timur	72,89	2,15	6,81	15,31	2,85	100,00
Sabu Raijua	66,92	2,06	8,64	19,83	2,55	100,00
Malaka	55,90	2,22	9,18	30,22	2,49	100,00
Kota Kupang	47,77	5,93	18,64	26,00	1,67	100,00
NTT	61,42	2,49	9,00	23,85	3,24	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2020-BPS

Tabel 2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumba Barat	79,69	61,75	71,06
Sumba Timur	81,16	62,46	72,13
Kupang	83,74	60,01	72,15
Timor Tengah Selatan	86,77	62,68	74,47
Timor Tengah Utara	85,66	70,85	78,13
Belu	82,71	57,79	70,23
Alor	80,82	70,17	75,27
Lembata	79,44	60,41	68,95
Flores Timur	81,99	63,02	71,79
Sikka	85,15	63,52	73,42
Ende	80,11	65,49	72,22
Ngada	80,76	62,86	71,49
Manggarai	84,28	69,23	76,53
Rote Ndao	83,71	61,99	73,07
Manggarai Barat	85,89	71,34	78,52
Sumba Tengah	85,34	53,39	69,98
Sumba Barat Daya	85,25	70,17	77,91
Nagekeo	82,36	58,90	70,05
Manggarai Timur	88,72	75,04	81,73
Sabu Raijua	80,84	68,97	75,11
Malaka	77,86	58,11	67,47
Kota Kupang	74,00	53,70	64,14
Nusa Tenggara Timur	82,64	63,91	73,11

Sumber: Sakernas Agustus 2020-BPS

Tabel 2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Wilayah (1)	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
Sumba Barat	4,76	2,84	3,96
Sumba Timur	3,47	3,51	3,49
Kupang	5,19	4,47	4,90
Timor Tengah Selatan	2,85	2,34	2,63
Timor Tengah Utara	4,21	4,32	4,26
Belu	7,59	7,18	7,42
Alor	4,32	1,83	3,11
Lembata	5,58	4,14	4,88
Flores Timur	3,74	2,51	3,16
Sikka	4,56	3,36	4,00
Ende	2,78	3,13	2,95
Ngada	4,77	4,60	4,69
Manggarai	6,13	1,75	4,09
Rote Ndao	4,92	4,88	4,90
Manggarai Barat	2,84	4,76	3,72
Sumba Tengah	3,49	4,94	4,02
Sumba Barat Daya	3,13	1,38	2,36
Nagekeo	3,23	2,90	3,09
Manggarai Timur	1,42	2,86	2,10
Sabu Rajjua	3,17	2,98	3,08
Malaka	3,48	3,81	3,63
Kota Kupang	10,80	11,04	10,90
Nusa Tenggara Timur	4,59	3,89	4,28

Sumber: Sakernas Agustus 2020-BPS

Lampiran Bab 3. Profil Anak

Tabel 3.1. Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Nusa Tenggara Timur
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Bayi (Jiwa)			Balita (Jiwa)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumba Barat	30	4	10	31	5	13
Sumba Timur	45	20	46	60	24	48
Kupang	93	37	84	105	51	91
Timor Tengah Selatan	144	85	88	163	103	106
Timor Tengah Utara	74	54	43	89	66	52
Belu	62	31	61	71	45	69
Alor	43	0	9	44	0	9
Lembata	25	37	22	32	42	31
Flores Timur	66	54	29	71	66	29
Sikka	80	19	45	98	34	60
Ende	40	4	13	41	5	15
Ngada	22	15	23	31	19	23
Manggarai	83	17	85	85	17	85
Rote Ndao	32	0	42	48	0	47
Manggarai Barat	55	13	52	55	24	56
Sumba Tengah	22	18	40	22	24	40
Sumba Barat Daya	34	34	31	39	39	39
Nagekeo	41	6	23	46	8	25
Manggarai Timur	45	51	36	47	52	38
Sabu Raijua	44	36	37	53	39	41
Malaka	16	3	11	16	6	13
Kota Kupang	35	18	16	43	20	16
NTT	1131	556	846	1290	689	946

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur



• STOP •

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK



Call Center

Layanan Profesional Psikolog
Psikiater dan Keagamaan

081138205000

DP3A Provinsi NTT

Membuka **Layanan Online
Konsultasi dan Pengaduan**
Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak



<https://dpppa.nttprov.go.id>



dp3aprovntt



dp3aprovntt